

# LAPORAN KINERJA



DIREKTORAT JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA

# 2018



JAKARTA, 2019



# Laporan Kinerja

## 2018

DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA



## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR TABEL</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR GRAFIK</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>iv</b>
<b>RINGKASAN EKLUSIF</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUGAS DAN FUNGSI	2
C. STRUKTUR ORGANISASI	3
D. INDIKATOR KINERJA UTAMA	4
E. PROFIL SUMBER DAYA MANUSIA	5
F. ISU STRATEGIS, POTENSI DAN PEMASALAHAN UTAMA	5
G. SISTEMATIKA PELAPORAN	14
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	<b>16</b>
A. RENCANA STRATEGIS	16
B. RENCANA KERJA	21
C. IHKTISAR PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018	21
D. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2018	22
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	<b>24</b>
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI TAHUN 2018	24
B. KINERJA LAIN	36
C. PAGU ANGGARAN DAN REALISASI TAHUN 2018	38
D. SUMBER DAYA DITJEN BIMAS BUDDHA	42
<b>BAB IV PENUTUP</b>	<b>45</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
1. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018	
2. RENCANA KERJA TAHUN 2018	
3. REALISASI ANGGARAN PENGHARGAAN	



[ortalabudha@gmail.com](mailto:ortalabudha@gmail.com)



(021) 3810671, 3810701



Gedung Kementerian  
Agama Lt. 16

Jln.M.H. Thamrin Nomor 06  
Jakarta Pusat





**DAFTAR TABEL**

Tabel 3.1	:	Sasaran strategis 1. Meningkatnya kualitas kehidupan umat beragama	.....	25
Tabel 3.2	:	IK Jumlah umat yang mendapatkan pembinaan penguatan keyakinan, karakter building, peningkatan ekonomi kreatif	.....	25
Tabel 3.3	:	Sasaran strategis 2. Meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan intern	.....	28
Tabel 3.4	:	IK Jumlah dialog kerukunan intern umat beragama Buddha	.....	28
Tabel 3.5	:	Sasaran strategis 3. Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan baragama	.....	29
Tabel 3.6	:	IK jumlah Lembaga keagamaan Buddha yang mendapat bantuan operasional, dll	.....	31
Tabel 3.7	:	Sasaran strategis 4. Meningkatnya akses layanan Pendidikan agama	.....	33
Tabel 3.8	:	IK jumlah mahasiswa yang mendapatkan bantuan bidik misi	.....	34
Tabel 3.9	:	IK jumlah mahasiswa penerima beasiswa PPA	.....	34
Tabel 3.10	:	IK jumlah mahasiswa penerima beasiswa non prestasi akademik	.....	35

**DAFTAR GRAFIS**

Grafis 3.1	:	Anggaran per fungsi	.....	39
Tabel 3.2	:	Anggaran per kegiatan	.....	40
Tabel 3.3	:	Pagu anggaran pusat dan daerah	.....	41
Tabel 3.4	:	Realisasi berdasarkan fungsi	.....	41
Tabel 3.5	:	Realisasi berdasarkan kegiatan	.....	42





**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1	:	Bagan struktur Ditjen Bimas Buddha	.....	3
Gambar 3.1	:	Pembinaan karakter building pemuda Buddhis di Bali	.....	26
Gambar 3.2	:	Pembinaan umat daerah terpencil desa Ngadas	.....	26
Gambar 3.3	:	Pembinaan umat daerah terpencil Suku Karo, Desa Paranguam	.....	27
Gambar 3.4	:	Pembinaan ekonomi kreatif bagi wanita Buddhis	.....	27
Gambar 3.5	:	Kegiatan dialog kerukunan umat baragama Buddha	.....	29
Gambar 3.6	:	Penerimaan penghargaan Duta BMN Teladan	.....	37
Gambar 3.7	:	Pembukaan kegiatan Sippa Dhamma Samajja 2018	.....	37
Gambar 3.8	:	Perlombaan Sippa Dhamma Smajja 2018	.....	38





Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhasa

# *Tripitaka*



## KATA PENGANTAR



Puji syukur kepada Tiratana, Tuhan Yang Maha Esa berkat karunia-Nya Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha telah menyelesaikan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2018. Pelaksanaan program dan kegiatan di maksud dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Tahun 2018.

Laporan kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilaksanakan tahun 2018. Laporan ini berisi informasi tentang capaian target kinerja, realisasi anggaran dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program kegiatan serta solusi tindak lanjut penyelesaiannya.

Secara umum, target tahun 2018 dapat dicapai dengan kategori baik, namun target tidak dapat dicapai sesuai dengan rencana karena terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya.

Perkenankan kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan kinerja Tahun 2018 serta mitra kerja terkait atas dukungan dan kerjasamanya, dalam pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Tahun 2018.

Kami berharap laporan ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha.

Jakarta, Januari 2019  
Direktur Jenderal

CALIADI





## IKTHISAR EKSEKUTIF

Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN). Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha menyusun laporan kinerja sebagai bentuk tanggungjawab serta perwujudan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi serta penggunaan anggaran (APBN).

Selain itu, laporan kinerja merupakan wujud dari kinerja dalam pencapaian visi dan misi sebagaimana dituangkan dalam tujuan dan sasaran strategis yang mengacu pada Rencana strategis tahun 2015 – 2019 dan Rencana Kerja tahun 2018.

Dalam mencapai visi tersebut Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi di bidang bimbingan masyarakat Buddha selalu berusaha melaksanakannya secara transparan dan akuntabel, serta berlandaskan keterbukaan.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha mempunyai 5 (lima) misi yaitu (1) meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama dalam membentuk mental umat Buddha; (2) Meningkatkan kerukunan intern umat beragama Buddha dalam memperteguh kebhinekaan; (3) Meningkatkan pelayanan kehidupan beragama Buddha yang merata dan berkualitas; (4) Meningkatkan akses dan mutu pendidikan agama dan pendidikan keagamaan yang berkarakter; dan (5) Meningkatkan kualitas tatakelola pemerintahan yang bersih, akuntabel dan terpercaya.

Dalam mencapai visi dan misi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha menetapkan 8 (delapan) tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu tahun 2015 – 2019 yaitu: (1) Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama Buddha dalam sikap dan kehidupan sehari-hari; (2) Meningkatkan pemahaman dan persepsi masyarakat mengenai kualitas





kerukunan umat beragama; (3) Meningkatkan kualitas pelayanan kehidupan beragama dan memberdayakan lembaga-lembaga social keagamaan Buddha; (4) Meningkatkan tatakelola pembangunan bidang agama; (5) Meningkatkan akses pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Buddha; (6) Meningkatkan kualitas pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Buddha; (7) Meningkatkan profesionalisme tenaga pendidika dan kependidikan agama dan pendidikan agama Buddha tingkat dasar dan menengah; dan (8) Meningkatkan akses pendidikan tinggi agama Buddha khususnya bagi masyarakat kurang mampu, serta meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan tinggi agama.

Untuk menunjang pencapaian tujuan strategis tersebut disusunlah peta strategis berdasarkan sistem manajemen pengelolaan kinerja berbasis balanced scorecard (BSC) yang terdiri dari empat perspektif yaitu stakeholder, costumer, internal proses dan learning and growth. Peta strategis tersebut terdiri dari delapan sasaran strategis, yaitu (1) Meningkatnya pemahaman, pengamalan, dan pelayanan agama Buddha, (2) Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama Buddha, (3) Meningkatnya akses pendidikan agama dan pendidikan keagamaan tingkar dasar dan menengah, (4) Meningkatnya kualitas pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Buddha tingkat dasar dan menengah, (5) Meningkatnya kualitas tenaga pendidik dan kependidikan agama dan keagamaan Buddha tingkat dasar dan menengah, (6) Meningkatnya akses pendidikan tinggi agama Buddha, (7) Meningkatnya kualitas pendidikan tinggi agama Buddha, dan (8) Meningkatnya kualitas tenaga pendidik dan kpendidikan tinggi agama Buddha.

Penilaian terhadap keberhasilan dan kegagalan pencapai sasaran strategis diukur dengan indikator kinerja utama (IKU). Kualitas IKU didasarkan pada kriteria SMART (spesific, measureable, agreeable, realistic, time bounded). Tahun 2018 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha telah menetapkan lima IKU pada level eselon I yang merupakan komitmen kinerja Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha.





Rerata capaian kinerja organisasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha tahun 2018 sebesar 92,62% lebih rendah dari capaian kinerja organisasi tahun 2017 sebesar 93,40%.

Secara umum capaian kinerja pada indikator kinerja utama (IKU) tahun 2018 adalah:

- 1) Indeks keshalihan sosial dengan target 75% realisasi 58,43% dengan capaian kinerja 83,47%
- 2) Indeks kerukunan umat beragama Buddha target 75,90% realisasi 70,90% dengan capaian kinerja 93,41%
- 3) Persentase Lembaga keagamaan Buddha yang berbadan hukum target 75% realisasi 70,72% dengan capaian kinerja 94,29%
- 4) Indeks layanan keagamaan Buddha target 75% realisasi 75,325% dengan capaian kinerja 100,43%
- 5) Angka partisipasi kasar (APK) perguruan tinggi Buddha target 0,006 realisasi 0,0055 dengan capaian kinerja 91,66%

Dari capaian kinerja diatas Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha melaksanakan lima kegiatan besar yang didalamnya terdapat sub kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja pada indikator kinerja utama. Lima kegiatan besar tersebut adalah; 1. Pemngelolaan dan pembinaan urusan agama Buddha, 2. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya, 3. Pengelolaan dan pembinaan Pendidikan agama Buddha, 4. Penyelenggaraan administrasi perkantoran Pendidikan Bimas Buddha, 5. Peningkatan akses, mutu, kesejahteraan dan subsidi Pendidikan tinggi agama Buddha.





## BAB 1

# PENDAHULUAN





## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha dalam pelaksanaan program bimbingan masyarakat Buddha dituntut harus dengan prudent, transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut diwujudkan salah satunya dengan laporan kinerja.

Laporan kinerja disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha dalam melaksanakan program dan kegiatan selama tahun anggaran 2018, yaitu dalam rangka mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, laporan kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan kinerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Agama Nomor 302 Tahun 2015 yang dirubah dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 702 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan





Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja pada Kementerian Agama.

## B. TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA

Dalam melaksanakan peran strategis Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi di bidang bimbingan Masyarakat Buddha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha mempunyai fungsi (a) Perumusan kebijakan di bidang urusan agama dan pendidikan agama dan keagamaan Buddha; (b) Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang urusan agama dan pendidikan agama dan keagamaan Buddha; (c) Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pendidikan agama dan keagamaan Buddha; (d) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang urusan agama dan keagamaan Buddha; (e) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang urusan agama dan pendidikan agama dan keagamaan Buddha; (f) Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha, dan (g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal. Direktur Jenderal dibantu oleh Sekretaris Direktorat Jenderal dan Direktur Urusan dan Pendidikan agama Buddha. Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di tingkat provinsi pelaksanaan tugas bimbingan masyarakat Buddha dilaksanakan oleh Pembimas Buddha dan di tingkat kab/kota oleh Seksi Bimas Buddha serta penyelenggara Buddha.

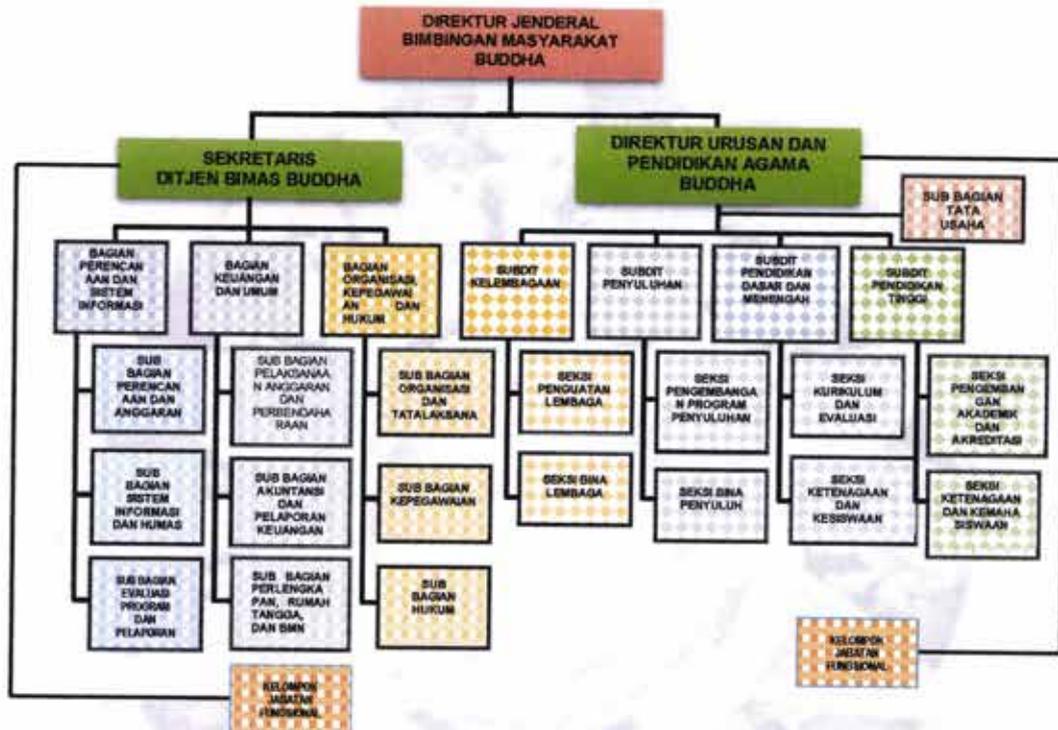




### C. STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA

agan struktur Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha sebagaimana terlihat pada gambar 1.1 berikut:

BAGAN STRUKTUR OARGANISASI DITJEN BIMAS BUDDHA



Gambar 1.1 Bagan Struktur Ditjen Bimas Buddha

Sesuai dengan bagan struktur organisasi di atas, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha didukung oleh 231 pegawai dengan distribusi pegawai pusat sebanyak 63 orang PNS dan 22 orang Pramubakti (Honorar) untuk pegawai daerah sebanyak 146 orang terdiri dari 129 PNS dan, Pramubakti (honorar) 17 orang, yang terdistribusi pada satuan kerja tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dengan jumlah pegawai sangat terbatas tersebut Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha harus tetap penuh semangat dan optimis dalam melayani masyarakat Buddha baik dari tingkat pusat, Provinsi maupun tingkat kabuapten/kota.





Namun demikian Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha telah berupaya untuk mengajukan penambahan pegawai ke Sekretariat Jenderal Kementerian Agama namun hingga saat ini belum dapat terealisasi. Dengan komposisi pegawai yang demikian Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha senantiasa optimis mencapai visi dan misinya.

#### D. INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Sebagai bagian dari organisasi Kementerian Agama memiliki peran strategis di bidang bimbingan masyarakat Buddha untuk membantu pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama dalam mewujudkan manusia Indonesia yang mampu memahami dan mengamalkan ajaran agamanya dalam kehidupan sehari-hari, dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, dan mengembangkan sikap tenggang rasa serta hormat menghormati antar umat beragama.

Untuk menjalankan peran strategis tersebut, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha telah menuangkan dalam sasaran strategis yang dikukur dengan indikator kinerja utama (IKU) seperti dalam tabel 1.1

Tabel 1.1 Sasaran strategis dan IKU

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
1	Meningkatkan kualitas kehidupan umat Buddha	1. Indeks keshalihan social umat beragama Buddha
2	Meningkatnya harmoni social dan kerukunan intern umat beragama Buddha	1. Indeks kerukunan umat beragama Buddha
3	Meningkatnya kualitas pelayanan keagamaan Buddha	1. Persentase lembaga keagamaan Buddha yang berbadan hukum 2. Indeks layanan keagamaan Buddha
4	Meningkatnya akses layanan pendidikan	1. APK pendidikan tinggi agama Buddha





## E. PROFIL SDM DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha didukung oleh 231 orang pegawai struktural terdiri dari pegawai Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha pusat sebanyak 85 orang atau (36,79%) dan 146 orang pegawai daerah atau (63,21%) yang terdistribusi pada Kantor Kementerian Agama provinsi/kabupaten/kota serta 46 (empat puluh enam) orang pegawai fungsional tertentu (penyuluh agama Buddha).

Untuk pegawai pusat dengan susunan eselon I sebanyak 1 orang, eselon II 2 orang, eselon III 7 orang, dan eselon IV 18 orang serta 31 orang jabatan fungsional umum dan 4 orang arsiparis. Untuk pegawai daerah terdiri dari Pembimas Buddha sebanyak 33 orang, Seksi Bimas Buddha sebanyak 2 orang, Penyelenggara Buddha 37 orang, dan jabatan fungsional umum sebanyak 57 orang dan 39 pegawai pramubakti (honorar). Dengan demikian, komposisi dan jumlah SDM Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha tahun 2018 tidak banyak berubah tetapi tetap dengan optimis melaksanakan tugas dan fungsinya.

Cakupan wilayah binaan yang luas dengan kondisi dan jumlah pegawai yang demikian serta terbatasnya tenaga pelayanan, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha berusaha menempatkan pegawai sesuai dengan tuntutan masyarakat dengan mengedepankan tenaga bidang layanan yang proporsional. Dalam rangka pencapaian sasaran kinerja tahun 2018 yang lebih efektif dan efisien, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha telah menempatkan pegawai yang tepat dan sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi dibidangnya dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

## F. ISU STRATEGIS, POTENSI DAN PERMASALAHAN UTAMA

Isu strategis, potensi dan permasalahan utama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha pada bidang agama dan pendidikan agama Buddha adalah sebagai berikut:





1. Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama Buddha. Sejumlah potensi yang dapat mendukung keberhasilan peningkatan kualitas Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama Buddha, antara lain:

- a. Adanya warisan budaya nusantara yang sangat luhur yang merupakan jati diri Bangsa Indonesia berupa kearifan lokal, budi pekerti yang dilaksanakan masyarakat Indonesia yang masih tetap dijalankan oleh masyarakat Buddha di Indonesia sampai dengan saat ini.
- b. Penyuluh atau tenaga teknis keagamaan Buddha yang memiliki potensi besar untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat yang berhubungan dengan kebutuhan umat dalam urusan pelayanan keagamaan Buddha (urusan kelahiran, perkawinan dan kematian) serta dapat menyampaikan program pemerintah melalui Bahasa agama;

Tingginya tingkat partisipasi umat Buddha dalam upaya peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan keagamaan Buddha. Partisipasi itu terwujud dalam bentuk berbagai kegiatan keagamaan Buddha, antara lain perayaan hari raya Keagamaan Buddha, puja bakti, penghayatan dhamma, pelatihan meditasi, pendalaman kitab suci, serta pelestarian budaya Buddhis.

Sejumlah permasalahan yang diperkirakan dapat menghambat upaya peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama Buddha, antara lain:

- a. Adanya kesenjangan antara nilai-nilai luhur yang terkandung dalam ajaran agama Buddha dengan perilaku sehari-hari umat, dimana di satu sisi berbagai kegiatan keagamaan tampak semarak dan dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat partisipasi dan semangat umat dalam melaksanakan kegiatan keagamaan, tetapi di sisi yang lain tingkat perilaku sosial yang menyimpang masih tetap terjadi, antara lain ditandai dengan masih adanya tindakan kriminalitas, kasus asusila, penipuan, penyalahgunaan narkoba dan korupsi;





- b. Adanya potensi konflik sebagai akibat pemahaman sempit terhadap ajaran agama dapat mengakibatkan terganggunya keharmonisan dan kerukunan intern umat Buddha. Gejala itu tampak dari berbagai aktifitas yang belum dilaksanakan secara bersama-sama, lebih cenderung di dalam kelompoknya sendiri sendiri;
- c. Terbukanya ruang bagi kemunculan berbagai paham keagamaan, baik yang bersifat lokal maupun transnasional sebagai dampak dari keterbukaan di era globalisasi tetapi tidak diiringi dengan kedewasaan masyarakat dalam beragama, sehingga tidak jarang muncul penafsiran ajaran agama sesuai dengan kepentingan masing-masing;
- d. Semakin banyaknya rohaniwan-rohaniwan asing yang datang ke Indonesia yang membawa berbagai paham keagamaan Buddha serta menyiarkannya kepada masyarakat Buddha.

## 2. Peningkatan Kualitas Kerukunan Umat Beragama Buddha

Sejumlah potensi yang dapat mendukung keberhasilan peningkatan kualitas Kerukunan Umat Beragama, antara lain:

- a. Adanya peran tokoh agama, tokoh perempuan dan tokoh pemuda Buddha yang dapat memberikan edukasi kepada umat Buddha terkait dengan kerukunan;
- b. Adanya jalinan kerjasama dengan berbagai lembaga keagamaan Buddha dalam ikut memelihara dan meningkatkan kerukunan umat beragama;
- c. Adanya media edukasi kepada umat Buddha yang bersumber dari Naskah Sastra, Sutra, Jataka yang berasal dari Tri Pitaka yang memuat sesanti Bhinneka Tunggal Ika pesan-pesan kerukunan;
- d. Meningkatnya kualitas kerukunan yang tercermin dalam sikap dan perilaku sosial yang sejalan dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam ajaran agama Buddha dan berkembangnya wawasan keagamaan yang moderat dan inklusif.





Sejumlah permasalahan yang diperkirakan dapat menghambat upaya peningkatan kualitas Kerukunan Umat Beragama, antara lain:

- a. Masih adanya sikap fanatisme sempit terhadap tradisi atau mazhab tertentu yang memandang tradisi atau mazhab lain tidak sesuai dengan ajaran Buddha;
- b. Adanya kecenderungan dari sebagian tokoh agama Buddha untuk membentuk organisasi keagamaan Buddha yang sejenis;
- c. Adanya klaim sepihak oleh umat Khonghucu atas Tempat Ibadah Tri Dharma (TITD) yang biasa disebut kelenteng yang merupakan salah satu mazhab agama Buddha;
- d. Adanya upaya sistematis dan terorganisir dalam perekrutan umat Khonghucu terhadap umat beragama Buddha.

### 3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama Buddha

Sejumlah potensi yang dapat mendukung keberhasilan peningkatan kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama, antara lain:

- a. Adanya struktur Bimbingan Masyarakat Buddha yang memungkinkan penyediaan pelayanan sampai ke tingkat provinsi dan kabupaten/kota akan memudahkan umat Buddha untuk mendapatkan pelayanan dibidang urusan agama Buddha dan pendidikan agama dan keagamaan Buddha;
- b. Tingginya tingkat partisipasi masyarakat Buddha, terutama tokoh agama, pandita, dharmaduta dan juga lembaga keagamaan Buddha dalam penyediaan pelayanan kepada umat Buddha.

Hal ini menjadi potensi penting bagi keberhasilan pelayanan keagamaan mengingat terbatasnya kemampuan dan kapasitas dibidang pelayanan keagamaan, terutama menyangkut urusan perkawinan dimana yang harus berhubungan dengan institusi lain yaitu Dinas Kependudukan untuk mendapatkan akte perkawinan, penyediaan sarana ibadah, bimbingan dan penyuluhan agama kepada umat Buddha.





Sejumlah permasalahan yang diperkirakan dapat menghambat upaya peningkatan kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama, antara lain:

- a. Jumlah tenaga pelayanan keagamaan Buddha belum memadai, baik dari segi jumlah yang dibutuhkan maupun distribusinya;
- b. Berkembangnya persepsi di kalangan masyarakat tentang masih rendahnya dukungan pemerintah kepada petugas penyedia layanan masyarakat seperti para tenaga pembimbing dan penyuluh agama baik PNS maupun Non PNS, para pemuka, tokoh agama, Dharmaduta serta pandita;
- c. Masih munculnya keluhan masyarakat terhadap kualitas pelayanan administrasi keagamaan seperti lambatnya pengurusan tanda daftar rumah ibadah, lembaga dan organisasi keagamaan Buddha lainnya;
- d. Pada beberapa daerah belum memiliki struktur organisasi, sehingga berpengaruh terhadap pelayanan keagamaan kepada masyarakat beragama Buddha;
- e. Belum adanya regulasi dan sarana prasarana dalam pelayanan perkawinan, dan kematian bagi masyarakat Buddha di seluruh Indonesia.
- f. Belum memanfaatkan teknologi dan informasi dalam melakukan pelayanan keagamaan Buddha, karena belum tersedianya sarana dan prasarana layanan online.

Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Buddha Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha memiliki peran penting dalam pembangunan pendidikan, yaitu melalui pembinaan dan pelayanan pendidikan agama pada satuan pendidikan umum dan penyelenggaraan pendidikan keagamaan. Pembinaan, pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan tersebut dilaksanakan dalam jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Pelaksanaan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Buddha yang menjadi wewenang Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat melalui lembaga Pendidikan keagamaan.





#### a. Pendidikan Agama

Sejumlah potensi yang dapat mendukung peningkatan mutu pendidikan agama pada satuan pendidikan umum, antara lain:

- a) Adanya regulasi yang menjadi dasar bagi penyelenggaraan pendidikan agama pada satuan pendidikan umum;
- b) Adanya lembaga pendidikan tinggi agama Buddha yang berperan sebagai penyedia tenaga pendidik dibidang pendidikan agama pada satuan pendidikan umum;
- c) Keberadaan forum-forum yang dapat menjadi wadah kerjasama dan saling tukar pengetahuan dan pengalaman di kalangan guru agama Buddha seperti Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) agama Buddha dan Kelompok Kerja Guru (KKG) agama Buddha dan Asosiasi Pengawas Pendidikan Agama Buddha Indonesia (APPABI);
- d) Adanya regulasi yang terkait dengan peningkatan kompetensi bagi guru-guru pendidikan agama Buddha;
- e) Adanya Badan Koordinasi Pendidikan Buddhis (BKPB) sebagai wadah bagi sekolah umum yang dikelola oleh yayasan pendidikan agama Buddha;
- f) Adanya siswa beragama Buddha pada sekolah umum yang masih tersebar dalam berbagai jenjang satuan pendidikan.

Sejumlah permasalahan yang diperkirakan dapat menghambat upaya peningkatan Mutu Pendidikan Agama pada satuan pendidikan umum, antara lain:

- a) Kebutuhan guru dan dosen pendidikan agama Buddha pada satuan pendidikan umum masih belum memadai;
- b) Peserta didik pada satuan pendidikan umum masih banyak yang belum terlayani karena tidak tersedianya guru agama Buddha, sehingga mereka harus mengikuti pelajaran agama Buddha yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan yang dikelola oleh rumah ibadah agama Buddha dalam bentuk Sekolah Minggu Buddha dan Dhamma Sekha;





- c) Belum tersedianya standar untuk menilai capaian mutu pendidikan agama Buddha pada satuan pendidikan umum;
- d) Masih terbatasnya jumlah tenaga pendidik agama Buddha yang berkualitas;
- e) Masih terbatasnya sarana dan prasarana untuk mendukung pembelajaran pendidikan agama Buddha pada satuan pendidikan umum;
- f) Masih lemahnya penyediaan data dan informasi pendidikan yang diperlukan bagi perencanaan dan pengembangan pendidikan agama pada satuan pendidikan umum.
- g) Masih belum maksimal dan efektifnya peran forum-forum seperti KKG dan MGMP pendidikan agama Buddha dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan agama Buddha pada satuan pendidikan umum;
- h) Masih kurangnya jumlah pengawas pendidikan agama Buddha dan pengawas yang ada masih perlu ditingkatkan kompetensinya.

#### **b. Pendidikan Keagamaan Buddha**

Sejumlah potensi yang dapat mendukung peningkatan Mutu Pendidikan Keagamaan Buddha, antara lain:

- a) Tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan keagamaan Buddha;
- b) Tingginya kepercayaan dan harapan masyarakat terhadap lembaga pendidikan keagamaan Buddha;
- c) Lembaga-lembaga pendidikan keagamaan Buddha bersifat mandiri.

Sejumlah permasalahan yang diperkirakan dapat menghambat upaya peningkatan mutu pendidikan keagamaan, antara lain:

- a) Belum adanya standarisasi pendidikan keagamaan Buddha dalam penyelenggaraan pendidikan keagamaan Buddha yang dilakukan oleh lembaga swasta;
- b) Rendahnya kualifikasi dan mutu tenaga pendidik pada lembaga pendidikan keagamaan Buddha;





- c) Terbatasnya sarana dan prasarana untuk mendukung pembelajaran yang berkualitas;
- d) Belum tersedianya standar untuk menilai mutu kelembagaan maupun kualitas capaian lembaga pendidikan keagamaan Buddha;
- e) Belum adanya standarisasi yang memadai dalam penyusunan kurikulum diantara penyelenggara pendidikan keagamaan Buddha;
- f) Terbatasnya kerangka regulasi untuk mendukung pengembangan kelembagaan pendidikan keagamaan Buddha;
- g) Lemahnya penyediaan data dan informasi pendidikan yang diperlukan bagi perencanaan dan pengembangan pendidikan keagamaan Buddha;
- h) Belum adanya format pengembangan pendidikan keagamaan Buddha secara berjenjang dalam mewujudkan ahli agama Buddha.

### **c. Pendidikan Tinggi Keagamaan Buddha**

Sejumlah potensi yang dapat mendukung upaya peningkatan akses dan mutu pendidikan tinggi keagamaan Buddha antara lain:

- a) Besarnya peran masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan;
- b) Mutu lembaga tinggi keagamaan, meski baru dalam jumlah kecil namun telah menunjukkan peningkatan;
- c) Lembaga pendidikan tinggi keagamaan telah menjadi wadah bagi jejaring internasional dengan universitas dan lembaga pendidikan tinggi yang lain di asia.

Sejumlah permasalahan yang dapat menjadi kendala bagi upaya peningkatan akses, dan mutu pendidikan tinggi keagamaan, antara lain:

- a) Penyelenggaraan pendidikan pendidikan tinggi yang lebih banyak dikelola oleh masyarakat/swasta dapat menimbulkan masalah terkait koordinasi dan standarisasi pelayanan;
- b) Rasio jumlah dosen dan mahasiswa masih terlalu rendah menimbulkan persoalan dalam hal efisiensi pembiayaan pendidikan;





- c) Masih terbatasnya ketersediaan tenaga pendidik yang berkualitas, baik dari segi jumlah maupun ketersebarannya;
- d) Masih terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang dapat memenuhi standar pelayanan minimal atau standar nasional pendidikan tinggi;
- e) Masih rendahnya kualitas hasil riset, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi hasil riset serta karya akademis lainnya.

#### 4. Peningkatan Kualitas Tatakelola Pembangunan Bidang Agama

Sejumlah potensi yang dapat mendukung terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha, antara lain:

- a. Adanya perbaikan sistem rekrutmen, penempatan dan evaluasi pegawai;
- b. Tersedianya pedoman kerja untuk seluruh satuan kerja di lingkungan Ditjen Bimas Buddha;
- c. Telah diterapkannya teknologi informasi dalam berbagai aspek perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program;
- d. Tingginya partisipasi masyarakat dalam peran pengawasan;
- e. Adanya kebijakan pemerintah terkait percepatan pemberantasan KKN dan reformasi birokrasi.

Sejumlah permasalahan yang dapat menjadi kendala dalam mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha, antara lain:

- a. Kapasitas dan profesionalisme sebagian aparatur Ditjen Bimas Buddha masih rendah;
- b. Masih adanya pola pikir lama pada sebagian aparatur sehingga tingkat penerimaan terhadap proses reformasi birokrasi belum menyeluruh;
- c. Belum tersedianya data valid tentang data keagamaan, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan yang berakibat pada perencanaan yang kurang baik.





- d. Adanya ketidakseimbangan beban tugas dengan ketersediaan tenaga teknis dan administrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha, khususnya pada struktur satker Bimas Buddha baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota;
- e. Adanya satuan kerja di lingkungan Ditjen Bimas Buddha yang memiliki anggaran/DIPA dan umat yang akan dilayani, tetapi tidak ada strukturnya.

## G. SISTEMATIKA PELAPORAN

Sistematika penyajian laporan kinerja Ditjen Bimas Buddha Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

### 1. Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategis issued) yang sedang dihadapi organisasi

### 2. Bab II : Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

### 3. Bab III : Akuntabilitas Kinerja

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

#### B. Realisasi Anggaran

Pada bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja





#### 4. Bab IV : Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

#### Lampiran :

1. Perjanjian Kinerja;
2. Lain-lain yang dianggap perlu





## BAB 2

# PERENCANAAN KINERJA





## PERENCANAAN KINERJA

### A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha tahun 2015 - 2019 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Nomor 436 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Tahun 2015 – 2019. Dalam renstra telah dirumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha sebagai berikut:

#### 1. Visi

Dalam rangka mendukung visi pembangunan nasional dan visi Kementerian Agama, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha menetapkan visi Tahun 2015-2019 adalah **“Terwujudnya Masyarakat Buddha Indonesia yang Taat Beragama, Rukun, Harmonis, Cerdas dan Sejahtera”**.

Visi tersebut dijabarkan sebagai berikut: Taat memiliki pengertian bahwa masyarakat Buddha mampu menjalankan setiap kegiatan keagamaan sesuai dengan ajaran agama Buddha. Masyarakat Buddha yang rukun memiliki pengertian bahwa masyarakat Buddha selalu berusaha mengembangkan keselarasan dan kerukunan baik intern maupun antar umat beragama, sehingga tercipta suasana harmonis dalam masyarakat Buddha. Masyarakat Buddha yang cerdas berarti Masyarakat Buddha yang memiliki kecerdasan intelektual, yaitu kecerdasan untuk mempelajari, memahami, dan menguasai ilmu agama, serta sains dan teknologi, mampu berfikir rasional, inovatif dan kreatif serta mampu mengaplikasikan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari; kecerdasan emosional yaitu kecerdasan untuk mengenali dan mengelola emosi diri dan orang lain, dapat memotivasi diri, serta berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang lain; serta kecerdasan spiritual, yaitu kecerdasan untuk memahami, menghayati, dan





mengamalkan nilai-nilai Agama Buddha dalam pikiran, ucapan dan tindakan. Masyarakat Buddha yang sejahtera berarti masyarakat Buddha yang aman, selamat, makmur serta sentosa, terlepas dari berbagai gangguan, yang berarti juga sejahtera lahir dan batin.

## 2. Misi

Dalam rangka mencapai visi tersebut Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha menetapkan misi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama dalam bentuk mental umat Buddha;
- b. Meningkatkan kerukunan intern umat beragama Buddha dalam memperteguh kebhinekaan;
- c. Menyediakan pelayanan kehidupan beragama Buddha yang merata dan berkualitas;
- d. Meningkatkan akses dan mutu pendidikan agama dan pendidikan keagamaan yang berkarakter;
- e. Meningkatkan kualitas tatakelola pemerintahan yang bersih, akuntabel dan tepercaya.

## 3. Tujuan

Tujuan yang akan dicapai Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha tahun 2015 – 2019 adalah:

- a. Tujuan bidang agama
  - 1) Meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama Buddha dalam sikap dan kehidupan sehari-hari;
  - 2) Meningkatkan pemahaman dan persepsi masyarakat mengenai kualitas kerukunan umat beragama;
  - 3) Meningkatkan kualitas pelayanan kehidupan beragama dan memberdayakan lembaga – lembaga sosial keagamaan Buddha;
  - 4) Meningkatkan tatakelola pembangunan bidang agama.





b. Tujuan bidang pendidikan

- 1) Meningkatkan akses pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Buddha;
- 2) Meningkatkan kualitas pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Buddha;
- 3) Meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan agama dan pendidikan agama Buddha tingkat dasar dan menengah;
- 4) Meningkatkan akses pendidikan tinggi agama Buddha khususnya bagi masyarakat kurang mampu, serta meningkatkan kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan tinggi agama Buddha.

Untuk mendukung pencapaian tujuan agar terukur dan dapat dicapai Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha menetapkan 8 sasaran strategis. Sasaran strategis Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sasaran strategis Kementerian Agama dan ditetapkan untuk dapat menjamin suksesnya pelaksanaan pembangunan jangka menengah yang bersifat menyeluruh, serta untuk memudahkan pengendalian dan pemantauan kinerja organisasi. Sasaran Strategis bidang agama adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kualitas pemahaman, pengamalan dan pelayanan agama Buddha, dengan indikator 1) meningkatnya jumlah penyuluh dan tenaga teknis keagamaan Buddha yang difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan; 2) meningkatnya jumlah fasilitasi pembinaan, pemberdayaan dan kerukunan intern umat beragama Buddha;
- b. Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama Buddha, dengan indikator 1) meningkatnya jumlah lembaga sosial keagamaan Buddha yang difasilitasi dalam penguatan dan pemberdayaan; 2) meningkatnya jumlah fasilitasi sarana dan prasarana pelayanan keagamaan; 3) meningkatnya jumlah naskah, norma, standar, prosedur dan kriteria;





4) meningkatnya jumlah fasilitasi pembinaan dan pengembangan budaya keagamaan Buddha.

Sasaran strategis bidang Pendidikan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha adalah:

- a. Meningkatnya akses pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Buddha tingkat dasar dan menengah, dengan indikator 1) meningkatnya Jumlah peserta didik yang difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan;
- b. Meningkatnya kualitas pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Buddha tingkat dasar dan menengah, dengan indikator 1) meningkatnya jumlah lembaga pendidikan agama dan keagamaan Buddha yang difasilitasi dalam penguatan dan pemberdayaan; 2) meningkatnya jumlah fasilitasi pembinaan dan pengembangan event pendidikan agama dan keagamaan Buddha; 3) meningkatnya jumlah satuan pendidikan yang menerapkan kurikulum yang berlaku; 4) meningkatnya jumlah satuan pendidikan yang memenuhi SPM; 5) Meningkatnya jumlah satuan pendidikan yang memenuhi SNP; 6) meningkatnya jumlah fasilitasi sarana dan prasarana pendidikan agama dan keagamaan Buddha; 7) meningkatnya jumlah naskah norma, Standard, Prosedur dan Kriteria pendidikan agama dan keagamaan Buddha yang disusun;
- c. Meningkatnya kualitas tenaga pendidik dan kependidikan Agama dan Keagamaan Buddha tingkat Dasar dan Menengah, dengan indikator 1) meningkatnya jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan; 2) jumlah Guru Pendidikan Agama Buddha non PNS yang menerima tunjangan profesi; 3) Meningkatnya jumlah guru yang tersertifikasi; 4) meningkatnya jumlah tenaga pendidik dan kependidikan Agama Buddha yang menerima insentif/ tunjangan;
- d. Meningkatkan Akses Pendidikan Tinggi Agama Buddha, dengan indikator 1) meningkatnya jumlah Mahasiswa Penerima Beasiswa Peningkatan





- Prestasi Akademik; 2) meningkatnya jumlah Mahasiswa penerima beasiswa miskin; 3) meningkatnya jumlah fasilitasi pembinaan dan pengembangan mahasiswa Buddhis;
- e. Meningkatkan Kualitas Pendidikan Tinggi Agama Buddha, dengan indikator 1) Meningkatnya jumlah fasilitasi pengabdian berbasis program pada masyarakat; 2) Meningkatnya jumlah fasilitasi pembinaan dan pengembangan PTAB; 3) Meningkatnya jumlah satuan pendidikan yang memenuhi SPM; 4) Meningkatnya jumlah satuan pendidikan yang memenuhi SNP; 5) Meningkatnya jumlah satuan pendidikan yang terakreditasi; 6) meningkatnya jumlah prodi satuan pendidikan yang terakreditasi minimal B; 7) meningkatnya jumlah sarana dan prasarana PTAB yang memenuhi standar; 8) meningkatnya jumlah perpustakaan PTABN yang ditingkatkan koleksi dan prasarannya; 9) meningkatnya jumlah layanan penyelenggaraan pendidikan pada PTABN; 10) Meningkatnya jumlah fasilitasi penelitian pada PTAB; 11) meningkatnya jumlah penelitian yang diterbitkan dalam jurnal internasional; 12) meningkatnya jumlah penelitian yang terdaftar di HAKI; 13) Meningkatnya jumlah Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN); 14) meningkatnya jumlah naskah Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria perguruan tinggi; 15) meningkatnya jumlah Fasilitasi pembinaan dan pengembangan event pendidikan pada PTAB;
- f. Meningkatkan Kualitas Tenaga pendidik dan Kependidikan Pendidikan Tinggi Agama Buddha, dengan indikator 1) meningkatnya jumlah fasilitasi pembinaan dan pengembangan dosen PTAB; 2) meningkatnya jumlah Dosen yang tersertifikasi; 3) meningkatnya jumlah dosen yang ditingkatkan kualifikasinya S3; 4) meningkatnya jumlah dosen yang ditingkatkan kompetensinya; 5) meningkatnya jumlah dosen yang menerima tunjangan fungsional; 6) Meningkatnya jumlah Dosen Non PNS yang menerima Tunjangan Profesi; 7) meningkatnya jumlah guru yang disertifikasi oleh PTABN melalui PPG.





## B. RENCANA KERJA

Dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra), Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha menyusun rencana kerja (Renja) tahun 2018 yang memuat kebijakan program, kegiatan yang meliputi kegiatan pokok dan kegiatan pendukung untuk mencapai sasaran strategis (terlampir). Renja dirinci kedalam indikator keluaran dan indikator sasaran.

Berdasarkan RKP, pagu anggaran dan Renja yang ditetapkan, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha menyusun rencana kerja dan anggaran (RKA). Dalam rangka mencapai sasaran strategis dan meningkatkan kinerja, maka Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha melakukan perjanjian kinerja mulai dari level eselon I dengan Menteri Agama sampai dengan level eselon IV. Untuk level pelaksana belum melakukan perjanjian kinerja tetapi melakukan penandatanganan SKP.

## C. IKHTISAR PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Perjanjian kinerja merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, serta Peraturan Menteri Agama Nomor 702 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Pada Kementerian Agama.

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisi kontrak kerja atau penugasan dari pimpinan yang lebih tinggi kepada pimpinan di bawahnya untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja tahun 2018 Direktur Jendderal Bimbingan Masyarakat Buddha adalah sebagaimana berikut:





Table 2.1 Perjanjian Kinerja Ditjen Bimas Buddha

Sasaran Strategis	IKU	Target
1. Meningkatnya kualitas kehidupan umat beragama	Indeks keshalihan sosial	70
2. Meningkatnya harmoni social dan kerukunan intern	Indeks kerukunan umat beragama	75,9
3. Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama	a. Persentase Lembaga keagamaan Buddha yang berbadan hukum	75
	b. Indeks layanan keagamaan	75
4. Meningkatnya akses layanan Pendidikan agama	APK Pendidikan tinggi keagamaan Buddha	0.006

#### D. PENGUKURAN KINERJA

Nilai kinerja organisasi diperoleh melalui serangkaian perhitungan dengan menggunakan data target dan realisasi indicator kinerja utama (IKU) yang tersedia. Dengan membandingkan realisasi dengan target indicator kinerja akan diperoleh indek capaian IKU. Indek perhitungan IKU perlu memperhitungkan jenis polarisasi IKU yang berlaku yaitu maximize, minimize, dan stabilize, namun dalam PMA nomor 702 Tahun 2016 belum mengatur tentang tatacara pengukuran kinerja secara detail.

Formula perhitungan indek capaian IKU Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha menggunakan formula:

$$\text{Indeks capaian IKU} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$





Adapun kategori capaian IKU adalah sebagai berikut :

< 100	Sangat baik
80 - 100	Baik
50 - 79	Cukup
X > 50	Kurang





## BAB 3

# AKUNTABILITAS





## **AKUNTABILITAS KINERJA**

### **A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Pengukuran kinerja organisasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha tahun 2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja utama (IKU). Dari hasil pengukuran tersebut diperoleh indek capaian kinerja organisasi. Indeks kinerja organisasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha adalah **92,62**. Nilai tersebut merupakan rerata capaian kinerja dari setiap capaian indikator kinerja utama (IKU).

Indikator kinerja utama tahun 2018 pencapaiannya tidak dapat dibandingkan dengan pencapaian IKU tahun 2015, 2016 dan 2017 karena tidak sama atau berubah signifikan. Untuk tahun 2018 Ditjen Bimas Buddha hanya memberikan laporan tentang pencapaian indikator kinerja utama tahun 2018.

Dengan sistem perencanaan yang berkembang maka indikator kinerja kegiatanpun mengalami perubahan meskipun tidak signifikan, sehingga terdapat indikator kegiatan yang pada tahun 2015, 2016 dan 2017 muncul dalam sistem tetapi tidak muncul untuk tahun 2018. Hal ini terjadi tidak menutup kemungkinan karena dari sisi perencanaan Ditjen Bimas Buddha tidak mengacu pada Renstra saat menyusun rencana kerja.

Pada tahun 2018 target kinerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha meliputi empat sasaran strategis dan lima indikator kinerja utama. Adapun capaian kinerja dari setiap sasaran strategis dan indikator kinerja utama (IKU) adalah:

#### **1. Sasaran strategis 1 meningkatnya kualitas hidup umat beragama.**

Dalam pencapaian sasaran strategis 1 dimewujudkan dengan mencapai target indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja kegiatan yang mendukung pencapaian IKU sebagai berikut:





Tabel 3.1

Sasaran strategis 1. <i>meningkatnya kualitas kehidupan umat beragama</i>				
Indikator Kinerja	Target	Realiasi	%	Kategori
Indeks keshalihan sosial	70	58,43	83,47	Baik
Rata-rata capaian kinerja			83,47 %	

IKU indeks keshalihan sosial tahun 2018 dengan nilai 58,47 dari skala 100 diperoleh dari kegiatan survey yang dilaksanakan oleh Badan Litbang dan Diklat. Dimana Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha menerima hasil survey dan menjadikan sebagai hasil pencapaian dari target IKU Ditjen Bimas Buddha. Indikator indeks keshalihan sosial tidak tercapai sebab ada beberapa indikator keshalihan sosial individu kurang baik. Indikator keshalihan sosial tersebut adalah tentang demokrasi, tidak menghina, konservasi, tidak memaksakan nilai, restorasi, mencegah kekerasan, good governance, giving, caring, dan menghargai perbedaan. Ketidak tercapaian indeks keshalihan sosial tersebut selain dari faktor indikator yang tidak tercapai kemungkinan lainnya adalah ketidak pahaman responden terhadap kuesioner atau Bahasa yang digunakan dalam wawancara kurang jelas. Indikator kinerja utama indeks keshalihan sosial dimulai tahun 2018 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tahun 2018 untuk mencapai target indikator kinerja utama indeks keshalihan sosial Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha melaksanakan kegiatan pendukung pencapaian IKU dengan indikator jumlah umat yang mendapatkan pembinaan penguatan keyakinan, karakter building, peningkatan ekonomi kreatif dengan capaian 1.106 orang dari target 1.220 orang atau 90,65%. Sebenarnya dengan kegiatan yang sudah dilakukan oleh Ditjen Bimas Buddha diharapkan indeks keshalihan sosial umat Buddha dapat tercapai.



Dengan hasil yang belum maksimal tersebut akan menjadikan kritik bagi peningkatan kualitas pelaksanaan program dan kegiatan yang akan mendorong pencapaian indeks keshalihan tersebut. IKU indeks keshalihan sosial ini masih akan digunakan pada tahun 2019 belum dapat dipastikan karena IKU unit eselon I harus selaras dengan IKU tingkat Kementerian Agama.

Tabel 3.2

IK. Jumlah umat yang mendapatkan pembinaan penguatan keyakinan, karakter building, peningkatan ekonomi kreatif							
Renstra		2018		2017		2016	
Target	realisasi	Target	realisasi	Target	realisasi	Target	realisasi
-	-	1.220	1.106	-	-	-	-
68,12 %		83,72%		100%		70%	

Indikator kegiatan pendukung dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator utama, kegiatan yang dilakukan tahun 2018 diantaranya pembinaan pemuda Buddhis dalam rangka membangun, membentuk karakter pemuda Buddhis yang cerdas, berkarakter, dan berkepribadian Indonesia.



Gambar 3.1 Pembinaan karakter Building Pemuda Buddhis di Bali

Ditjen Bimas Buddha juga melaksanakan kegiatan pembinaan umat Buddha daerah terpencil untuk menumbuhkan keyakinan terhadap ajaran agama Buddha serta menumbuhkan rasa percaya kepada Pemerintah yaitu Kementerian Agama bahwa kita hadir untuk



mereka dengan program Bimbingan Masyarakat Buddha. Daerah yang dijadikan sasaran untuk tahun 2018 adalah, Desa Ngadas, Kecamatan Sumber Pucung, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur dan Suku Karo, Desa Paranguam, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara.



Gambar 3.2 Pembinaan umat Budha daerah terpencil desa Ngadas



Gambar 3.3 Pembinaan umat Buddha daerah terpencil Suku Karo, Desa Paranguam

Untuk peningkatan ekonomi kreatif Ditjen Bimas Buddha melaksanakan kegiatan workshop peningkatan ekonomi kreatif bagi wanita Buddhis dengan tujuan untuk mendorong wanita Buddhis untuk kreatif, inovatif dan berkreasi sesuai kemampuan dan daya yang dimiliki. Dengan pembinaan ekonomi kreatif tersebut diharapkan dapat meningkatkan ekonomi dan memberikan dampak sosial pada masyarakat dan lingkungan sekitar.





Gambar 3.4 Pembinaan ekonomi kreatif bagi wanita Buddhis

## 2. Sasaran strategis 2 meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan internal

Dalam pencapaian sasaran strategis 2 diwujudkan dengan mencapai target indikator kinerja utama (IKU) Indeks kerukunan umat beragama dan pencapaian indikator kegiatan yang mendukung pencapaian IKU sebagai berikut:

Tabel 3.3

Sasaran strategis 1. <i>meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan intern</i>						
Indikator Kinerja			Target	Realiasi	%	Kategori
Indeks kerukunan umat beragama			75,9	70,90	93,41	Baik
Rata-rata capaian kinerja					93,41 %	

IKU indeks kerukunan umat beragama tahun 2018 dengan nilai 70,90 dengan skala 100 dari target nilai sebesar 75,9. Nilai indeks ini didapat dari hasil survey yang dilakukan oleh Badan Litbang Kementerian Agama. Nilai indeks kerukunan umat beragama yang dijadikan hasil pencapaian IKU Ditjen Bimas Buddha adalah sama





dengan hasil untuk IKU Kementerian Agama. Indikator kinerja utama indeks kerukunan umat beragama target tidak dapat tercapai sebab ada beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain pemahaman umat terhadap ajaran agamanya yang masih sempit sehingga menimbulkan fanatisme yang akut sehingga mereka yang sudah terpapar fanatisme tersebut cenderung tidak dapat menerima perbedaan paham ajaran agama. Dengan fanatisme yang cenderung radikal dapat menimbulkan beberapa keresahan didalam masyarakat dan akan menciderai nilai nilai agama yang diyakininya dan juga akan mengkoyak kerukunan umat beragama. Indikator kinerja utama indeks kerukunan umat beragama baru dimulai tahun 2018 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Untuk mendukung pencapaian IKU Ditjen Bimas Buddha melaksanakan kegiatan yang mendukung pencapaian IKU dengan indikator jumlah dialog kerukunan intern umat beragama Buddha dengan capaian kinerja 83,72% atau 36 kegiatan dialog dari target tahun 2018 sebanyak 43 kegiatan. Untuk indikator kegiatan ini dilakukan sejak tahun 2016 sehingga dapat diketahui sampai dengan tahun 2018 sudah berapa banyak kegiatan dialog kerukunan dilaksanakan oleh Ditjen Bimas Buddha.

Tabel 3.4

IK. Jumlah dialog kerukunan intern umat beragama Buddha							
Renstra		2018		2017		2016	
Target	realisasi	Target	realisasi	Target	realisasi	Target	realisasi
160	109	43	36	38	38	50	35
68,12 %		83,72%		100%		70%	

Indikator kegiatan tersebut diatas jika dilihat dari tingkat capaian renstra hanya 68,12% padahal sudah memasuki tahun ke empat renstra.



Untuk memenuhi target renstra maka tahun 2019 untuk indikator kegiatan jumlah dialog kerukunan umat beragama Buddha harus direncanakan sebanyak 51 kegiatan dialog kerukunan intern umat beragama Buddha. Tetapi dari segi anggaran bidang agama sangatlah terbatas, harapan sangatlah kecil tahun 2019 dapat memenuhi target renstra tersebut.



Gambar 3.5 Kegiatan dialog kerukunan umat beragama Buddha

### 3. Sasaran strategis 3 meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama

Dalam pencapaian sasaran strategis 2 diwujudkan dengan mencapai target 2 indikator kinerja utama (IKU) Persentase lembaga keagamaan Buddha yang berbadan hukum dan indeks layanan keagamaan. Indikator kinerja utama dicapai dengan didukung pencapaian indikator kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.5

Sasaran strategis 3. <i>meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama</i>					
Indikator Kinerja	Target	Realiasi	%	Kategori	
Persentase Lembaga keagamaan Buddha yang berbadan hukum	75	70,72	94,29	Baik	
Indeks layanan keagamaan	75	75,325	100,43	Sangat baik	
Rata-rata capaian kinerja			97,36 %		





IKU persentase lembaga keagamaan Buddha yang berbadan hukum yang menjadi target tahun 2018 adalah 75% (727 lembaga) dari target renstra 970 lembaga dengan capaian 70,72% (686 lembaga). Dengan capaian 70,72% pada tahun 2018, maka untuk mencapai target renstra 100% tahun 2019 Ditjen Bimas Buddha harus mencapai target 29,28% atau 284 lembaga keagamaan yang harus terdaftar dan berbadan hukum. Indikator kinerja utama persentase Lembaga keagamaan Buddha yang berbadan hukum tidak tercapai sebab kecenderungan perencanaan dalam menetapkan target tidak melihat data tahun sebelumnya. Dan indikator inipun baru dimulai tahun 2018 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Untuk mendukung pencapaian IKU Ditjen Bimas Buddha melaksanakan kegiatan yang mendorong Lembaga keagamaan Buddha yang belum berbadan hukum untuk mendaftarkan agar memiliki legalitas secara hukum dengan indikator kegiatan jumlah Lembaga agama dan keagamaan Buddha yang mendapatkan pembinaan manajemen dengan capaian 68,42% (13 lembaga) dari target 19 lembaga.

IKU indeks layanan keagamaan dengan target 75% dengan skala 100 tahun 2018 tercapai dengan angka 75,325% sedikit diatas target. Survey indek dilakukan oleh Ditjen Bimas Buddha kerjasama dengan Badan Litbang Kementerian Agama. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat atas Layanan Keagamaan Ditjen Bimas Buddha memperlihatkan IKM atas Layanan Keagamaan Ditjen Bimas Buddha sebesar 3,013 (pada skala 4) atau 75,325 (pada skala 100). Nilai Mutu Pelayanan berada pada kategori "C" dengan Nilai Unit Pelayanan dalam kategori "Kurang Baik". Berbagai hal yang ikut berkontribusi pada permasalahan ini, yaitu: (i) unsur sarana dan prasarana khususnya pada kapasitas ruang pelayanan dan kelengkapan sarana dan prasarana; (ii) unsur waktu pelayanan khususnya ketepatan waktu penyerahan produk pelayanan, dan percepatan penyerahan produk





pelayanan. Namun, ditemukan pula praktik-praktik yang sudah baik di tiga unsur pelayanan lainnya.

Survei kepuasan masyarakat ini merekomendasikan perlunya: (i) memasukkan program peningkatan IKM Layanan Keagamaan Ditjen Bimas Buddha pada Rencana Strategis 2020 – 2024 dan Rencana Kinerja Tahun (RKT) 2019; (ii) melakukan langkah parsial perbaikan unsur sarana dan prasarana dengan memetakan kapasitas ruang pelayanan dan kelengkapan sarana dan prasarana diikuti penganggaran, koordinasi dengan instansi terkait otoritas luasan lahan serta eksekusi yang konsisten; (iii) melakukan langkah parsial perbaikan unsur waktu pelayanan dengan memetakan ketepatan waktu penyerahan produk pelayanan, dan percepatan penyerahan produk pelayanan diikuti penganggaran dan koordinasi dengan instansi terkait otoritas rekrutmen pegawai serta eksekusi yang konsisten; (iv) atau melakukan langkah integral dengan menyusun roadmap beserta anggaran dan eksekusinya untuk pelayanan keagamaan *full online* dan secara swalayan dalam satu aplikasi *smartphone* dengan featur sederhana sesuai kapasitas masyarakat desa sehingga tidak memerlukan tambahan lahan dan personil khusus untuk aplikasi tersebut. Indikator kinerja utama indeks kepuasan layanan keagamaan dimula tahun 2018 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Indikator kegiatan pendukung pencapaian IKU yang dilaksanakan Ditjen Bimas Buddha adalah:

Table 3.6

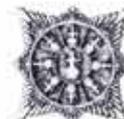
IK. Jumlah Lembaga agama dan keagamaan Buddha yang mendapat bantuan operasional							
Renstra		2018		2017		2016	
Target	realisasi	Target	realisasi	Target	realisasi	Target	realisasi
-	-	19	13	-	-	-	-
		68,42%					





IK. Jumlah rumah ibadah yang mendapat bantuan rehabilitasi/renovasi/pembangunan							
Renstra		2018		2017		2016	
Target	realisasi	Target	realisasi	Target	realisasi	Target	realisasi
1.500	324	55	55	164	138	143	131
21,60%		100%		84,14		91,60%	
IK. Jumlah rumah ibadah yang mendapatkan pembinaan manajemen							
Renstra		2018		2017		2016	
Target	realisasi	Target	realisasi	Target	realisasi	Target	realisasi
-	-	46	39	-	-	-	-
		84,78%					
IK. Jumlah rumah ibadah yang memperoleh bantuan pensertifikatan							
Renstra		2018		2017		2016	
Target	realisasi	Target	realisasi	Target	realisasi	Target	realisasi
-	-	27	0	-	-	-	-
		0%					
IK. Jumlah penyuluh agama Buddha non PNS yang mendapat pembinaan kualitas SDM (TOT)							
Renstra		2018		2017		2016	
Target	realisasi	Target	realisasi	Target	realisasi	Target	realisasi
2.500	983	290	200	52	52	1693	731
39,32		68,96%		100%		43,17%	
IK. Jumlah penyuluh agama Buddha non PNS yang mendapat tunjangan							
Renstra		2018		2017		2016	
Target	realisasi	Target	realisasi	Target	realisasi	Target	realisasi
10.200	7.242	1.648	1.648	1.648	1.648	2.210	2.210
71%		100%		100%		100%	
IK. Jumlah penyuluh agama Buddha non PNS yang mendapatkan pembinaan kualitas SDM							
Renstra		2018		2017		2016	
Target	realisasi	Target	realisasi	Target	realisasi	Target	realisasi
-	-	154	179	-	-	-	-
		116,23%					
IK. Jumlah Lembaga agama dan keagamaan Buddha yang menerima bantuan sarana dan prasarana							
Renstra		2018		2017		2016	





Target	realisasi	Target	realisasi	Target	realisasi	Target	realisasi
-	-	56	35	-	-	-	-
		62,50%					
IK. Jumlah pembinaan keluarga Hittasukhaya							
Renstra		2018		2017		2016	
Target	realisasi	Target	realisasi	Target	realisasi	Target	realisasi
400		2.004	1.526	1.252	1.203	-	-

Dari indikator kegiatan yang mendukung IKU indeks layanan keagamaan dalam perencanaan baik renstra maupun renja tidak konsisten setiap tahunnya. Hal ini karena dalam menyusun renja tidak mengacu kepada renstra dan IKU yang selalu berubah setiap tahun.

#### 4. Sasaran strategis 4 meningkatnya akses layanan pendidikan agama

Dalam pencapaian sasaran strategis 4 diwujudkan dengan mencapai target indikator kinerja utama (IKU) APK Pendidikan tinggi keagamaan Buddha. Indikator kinerja utama dicapai dengan didukung pencapaian indikator kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.7

Sasaran strategis 4. meningkatnya akses layanan Pendidikan agama						
Indikator Kinerja			Taget	Realiasi	%	Kategori
APK	Pendidikan tinggi	keagamaan Buddha	0,006	0,0055	91,66	Baik
Rata-rata capaian kinerja					91,66 %	

IKU APK Pendidikan tinggi keagamaan Buddha dengan angka 0,0055 dari target 0.006 atau 91,66%. APK tidak tercapai karena minat penduduk Indonesia yang berumur antara 19 sampai dengan 24 tahun untuk masuk ke PTK Buddha sangat kecil. Selain itu PTK Buddha sendiri belum mampu bersaing dengan PT lainnya. Selain dari segi kualitas lulusan juga dari segi program studi atau jurusan yang ada pada PTK Buddha yang ada hanya berkutat pada bidang agama.





Seandainya PTK Buddha dapat membuka program studi yang banyak diminati oleh masyarakat Indonesia seperti program studi bidang IT, Keuangan, Bahasa atau yang lainnya, kemungkinan besar akan banyak masyarakat yang akan masuk pada PTK Buddha.

Dalam pencapaian IKU didukung dengan indikator kegiatan yang dilaksanakan oleh Ditjen Bimas Buddha yaitu:

Table 3.8

IK. Jumlah mahasiswa yang mendapatkan bantuan bidik misi							
Renstra		2018		2017		2016	
Target	realisasi	Target	realisasi	Target	realisasi	Target	realisasi
1.750	601	175	287	350	139	300	175
34,34%		164%		39,71%		58,33	

Untuk indikator kegiatan jumlah mahasiswa yang mendapat bantuan bidik misi dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 tercapai sebesar 34,34%. Tapi untuk tahun 2015 indikator kegiatan jumlah indikator yang mendapatkan bantuan bidik misi adalah jumlah mahasiswa penerima bantuan beasiswa miskin dengan capaian sebesar 93,40% dari target 500 orang. Sehingga jika digabungkan dari tahun 2015 sampai dengan 2018 maka capaian indikator kegiatan sebesar 1.068 orang atau 61,02% dari target renstra. Target renstra tersebut juga merupakan target dari indikator jumlah mahasiswa penerima beasiswa miskin dan pada tahun 2016 terjadi perubahan kebijakan dari BAPENAS yang semula beasiswa miskin dirubah menjadi beasiswa bidik misi.

Tabel 3.9

IK. Jumlah mahasiswa penerima beasiswa PPA							
Renstra		2018		2017		2016	
Target	realisasi	Target	realisasi	Target	realisasi	Target	realisasi
250	214	75	70	50	42	102	102
85,60%		93,33%		84,00%		100%	





Indikator kegiatan jumlah mahasiswa penerima beasiswa Pengembangan prestasi akademik (PPA) sampai dengan empat tahun renstra tercapai 85,60% atau 214 orang. Dan untuk memenuhi target renstra tahun 2019 harus mengalokasikan anggaran untuk beasiswa pengembangan prestasi akademik untuk 36 orang. Dari segi kemanfaatannya Beasiswa PPA ini dapat memacu mahasiswa untuk mengembangkan diri dalam akademik dan meningkatkan semangat untuk terus belajar dan berkembang.

Table 3.10

IK. Jumlah mahasiswa penerima beasiswa non prestasi akademik							
Renstra		2018		2017		2016	
Target	realisasi	Target	realisasi	Target	realisasi	Target	realisasi
-	-	125	12	-	-	-	-
		9,60%					

Indikator kegiatan jumlah mahasiswa penerima beasiswa non prestasi akademik ada dari tahun 2018 dan dalam belum menjadi indikator atau target renstra. Indikator kegiatan jumlah mahasiswa penerima beasiswa non prestasi akademik dengan capaian 9,60% atau 12 orang sangat jauh target. Untuk target tahun 2018 sepertinya terlalu tinggi sebab setiap tahun hanya dapat mengajukan satu kali bagi mahasiswa yang memperoleh prestasi dibidang selain kademik seperti bidang olahraga, seni dll minimal juara ke tiga tingkat kabupaten atau kota.

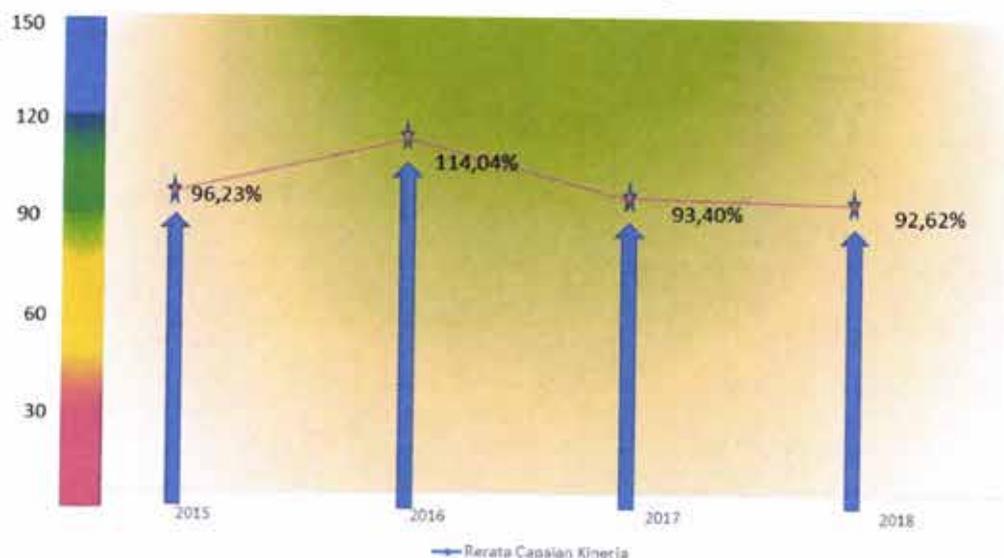
Dari semua indikator kinerja utama (IKU) Ditjen Bimas Buddha tahun 2018 rerata capaian kinerja 92,62% dalam kategori baik. Untuk indikator indeks yang pencapaiannya diperoleh dari survey yang dilaksanakan oleh Badan Litbang tersebut Ditjen Bimas Buddha harus memperbaiki dan mempertajam kebijakan program untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Seperti indeks keshalihan sosial dengan hasil tidak memuaskan, maka Ditjen Bimas Buddha untuk tahun berikut harus menyusun kebijakan dan strategi





untuk mencapai semua target indikator utama maupun indikator pendukung yaitu indikator kegiatannya.

Grafis 3.1 Rerata kinerja tahun 2015 sampai dengan tahun 2018



## B. PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2018

Tahun 2018 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha menetapkan program prioritas yang mendukung pencapaian sasaran strategis sebagai berikut:

No	Program	Target	Capaian	%
Bidang Agama				
1	Bantuan tunjangan penyuluh non PNS	1649	1649	100
2	Dialog kerukunan umat agama Buddha	35	36	102,86
3	Bantuan rumah ibadah	65	66	101,54
Bidang Pendidikan				





1	Guru Pendidikan agama Buddha baik PNS maupun Non PNS yang menerima tunjangan profesi	830	553	66,63
2	Pengawas Pendidikan agama Buddha penerima tunjangan profesi	18	18	100
3	Bantuan insentif tenaga pendidik dan kependidikan	1.700	1.703	100,18
4	Pembangunan daerah 3T	92	92	100
5	Mahasiswa yang mendapatkan beasiswa bidik misi	175	168	96
7	Mahasiswa yang mendapatkan beasiswa peningkatan prestasi akademik (PPA)	50	70	140
8	Institusi PTAB yang terakreditasi B	3	3	100
9	Prodi PTAB yang akreditasi B	6	6	100
10	Penelitian kelompok	117	80	68,38
11	Pengabdian masyarakat	30	30	100

Rerata capaian program prioritas tahun 2018 untuk bidang agama sebesar **101,47%** sedangkan untuk bidang Pendidikan sebesar **88,29%**.

### C. KINERJA LAINNYA

Selain empat sasaran strategis yang ditetapkan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha dengan capaian seperti diuraikan di atas, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha memiliki kinerja yang tidak termasuk dalam perjanjian kinerja namun terkait dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha. Kinerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha tersebut adalah sebagai berikut:



## 1. Pengelolaan Barang Milik Negara

Tahun 2018 Ditjen Bimas Buddha mendapatkan penghargaan dari Menteri Agama dalam kategori Duta BMN Teladan sebagai peringkat ke tiga yang dianugerahkan kepada Saudara Siswanto selaku pengelola BMN Ditjen Bimas Buddha. Penganugerahan penghargaan tersebut dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus 2018 di Jakarta oleh Menteri Agama.



Gambar 3.6 Penerimaan Penghargaan Duta BMN Teladan

## 2. Pelaksanaan Kegiatan Sippa Dhammasamajja Tingkat Nasional

Sippa Dhammasamajja tingkat nasional merupakan ajang adu bakat untuk anak usia sekolah dasar dan menengah yang diikuti oleh perwakilan dari semua provinsi. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Menteri Agama dengan dihadiri oleh tokoh agama Buddha, dan tamu undangan dari unit eselon I lain.





Gambar 3.7 Pembukaan Kegiatan Sippa Dhammasamajja 2018

Kegiatan Sippa Dhammasamajja tahun 2018 diikuti oleh 794 orang eserta yang terdaftar secara online tetapi dalam pelaksanaan yang hadir 768 orang, peserta yang tidak hadir adalah dari Provinsi Sulawesi Tengah dimana pada saat pelaksanaan di Sulawesi Tengah terjadi bencana gempa bumi dan tsunami, sehingga mereka membatalkan keberangkatan mereka untuk berpartisipasi dalam Sippa Dhammasamajja tahun 2018. Adu bakat yang diselenggarakan pada acara Sippa Dhammasamajja tahun 2018 antara lain Pembacaan Kitab Dhammapada, Menyanyi Lagu Rohani Buddhis, Cerdas Cermat bidang Agama, Melukis Kisah Buddha. Kegiatan ini dilaksanakan tanggal 8 sampai dengan 12 Oktober 2018.



Gambar 3.8 Perlombaan Sippa Dhammasamajja 2018

## C. PAGU ANGGARAN DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2018

### 1. Pagu Anggaran

Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2018 untuk mencapai target Indikator Kinerja Utama dan mewujudkan visi,

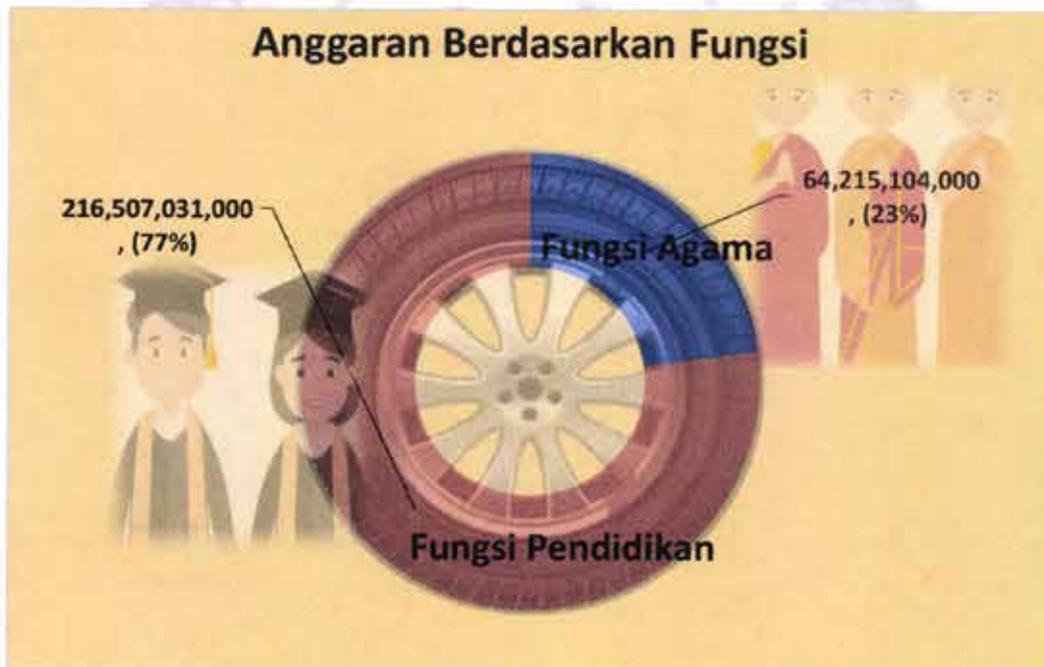


misi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha sebagaimana tertuang dalam Renstra 2015 – 2019, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha memperoleh alokasi anggaran pada DIPA tahun 2018 sebesar Rp 280.722.135.000,-. Dengan alokasi anggaran untuk satuan kerja pusat Rp.50.933.047.000,- atau 18,15% dan untuk satuan kerja daerah Rp.229.789.088.000,- atau 81,85%.

### A. Anggaran Per Fungsi

Berdasar fungsinya anggaran Ditjen Bimas Buddha dibagi menjadi dua yaitu anggaran fungsi agama dan anggaran untuk fungsi pendidikan.

Grafis 3.1 Anggaran Per Fungsi



### B. Anggaran Per Kegiatan

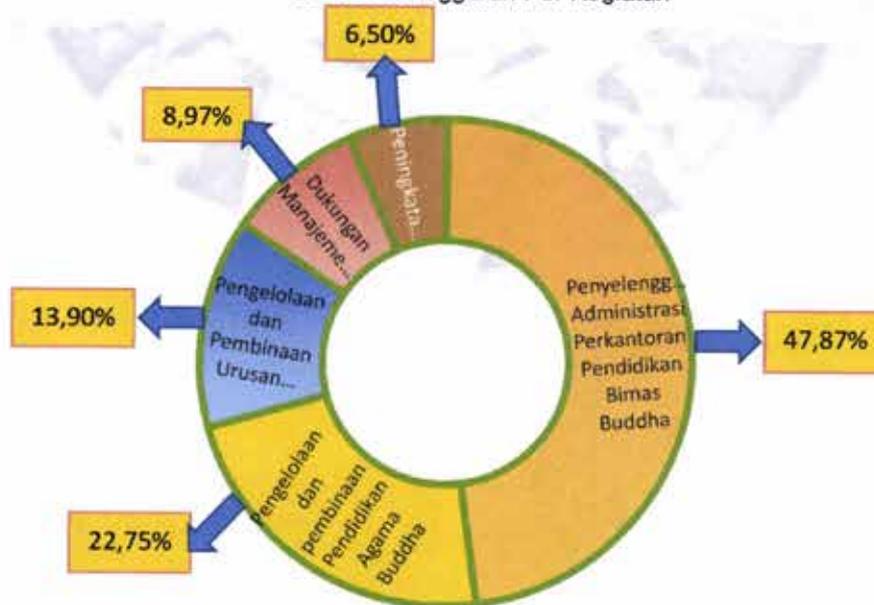
Berdasarkan kegiatan anggaran Ditjen Bimas Buddha dialokasikan untuk lima jenis kegiatan yang ada dalam DIPA yaitu, kegiatan pengelolaan dan pembinaan urusan agama Buddha, Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya, pengelolaan





dan pembinaan Pendidikan agama Buddha, Penyelenggaraan administrasi perkantoran Pendidikan Bimas Buddha, dan Peningkatan akses, mutu, kesejahteraan dan subsidi Pendidikan tinggi agama Buddha. Alokasi Anggaran perkegiatan ini dimanfaatkan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan untuk mendukung pencapaian visi, misi serta pencapaian indikator kinerja utama. Untuk kegiatan pengelolaan dan pembinaan agama untuk menunjang sub kegiatan bidang agama, untuk kegiatan dukungan manajemen menunjang sub kegiatan bidang kesekretariatan Ditjen Bimas Buddha, kegiatan pembinaaan dan pengelolaan Pendidikan dasar dan menengah menunjang sub kegiatan bidang Pendidikan dasar dan menengah, kegiatan penyelenggaraan admistrasi perkantoran bimas Buddha menunjang sub kegiatan bidang admistrasi perkantoran Pendidikan yang dimanfaatkan untuk membayar gaji dan tunjangan bidang Pendidikan seperti gaji guru dan dosen, kegiatan peningkatan akses, mutu, kesejahteraan dan subsidi Pendidikan tinggi agama Buddha menunjang sub kegiatan bidang Pendidikan tinggi.

Grafis 3.2 Anggaran Per Kegiatan





### C. Alokasi Anggaran Pusat dan Daerah

Anggaran tahun 2018 dialokasikan untuk satuan kerja pusat dan daerah. Pengalokasian anggaran dari pusat dibagikan ke pada satuan kerja tingkat provinsi dan satuan kerja provinsi mengalokasikan anggaran tersebut ke satuan kerja tingkat kabupaten atau kota. Alokasi untuk tingkat satuan kerja provinsi sebagaimana dalam garfis berikut:

Grafis 3.3 Pagu Anggaran Pusat dan Daerah



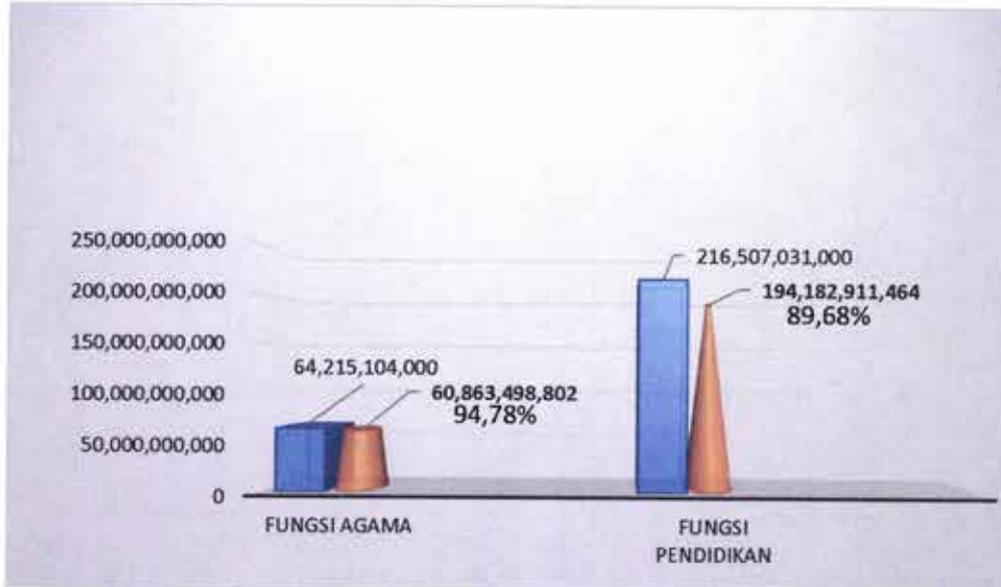
### 2. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha per 31 Desember 2018 adalah Rp 255.046.410.265,- atau sebesar 90,85% dari total anggaran sebesar Rp 280.722.135.000,-. Realisasi anggaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha berdasarkan fungsi, kegiatan dan satuan kerja adalah sebagai berikut:

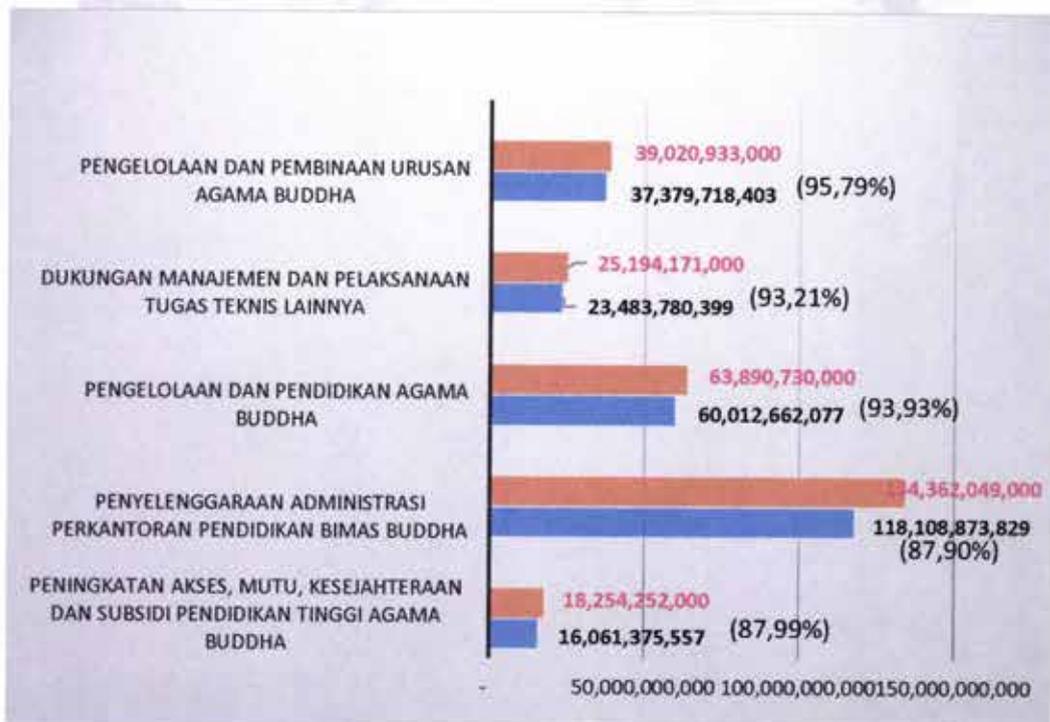




Grafis 3.4 Realisasi Berdasar Fungsi



Grafis 3.5 Realisasi berdasar Kegiatan





## D. SUMBER DAYA DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA

### 1. Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas dan fungsi untuk mendukung pelaksanaan program Bimbingan Masyarakat Buddha pada tahun 2018, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha didukung oleh sumber daya manusia yang sangat terbatas dibandingkan dengan tugas dan fungsinya. Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha berjumlah 231 orang pegawai struktural, dengan rincian 62 orang pegawai pada satuan kerja pusat dan 169 orang pegawai pada satuan kerja daerah.

Namun demikian, dengan jumlah sumber daya manusia yang kurang memadai tersebut pegawai Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha tetap bersemangat dan berkinerja baik dalam melaksanakan tugas dan fungsi menjalankan program bimbingan masyarakat Buddha tahun 2018 dengan capaian indikator kinerja sebesar 92,62% atau dengan kategori baik.

### 2. Sumber Pendanaan

Dari segi pendanaan, seluruh program bimbingan masyarakat Buddha bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tahun 2018 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha mendapat dana dari APBN sebesar Rp. 280.722.135.000,-. Dari dana tersebut dipergunakan untuk pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis tahun 2018. Dana dari APBN tahun 2018 terserap sebesar Rp.255.046.410.265,- atau 90,85%. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha memiliki dua unit pelaksana teknis (UPT) yaitu STAB Negeri Sriwijaya dan STAB Negeri Raden Wijaya. Kedua PTKN tersebut berkontribusi terhadap pendapatan negara berupa setoran penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari hasil pembayaran biaya studi oleh mahasiswa pada STAB





Negeri. Pada tahun 2017 hasil PNBK kedua STAB tersebut sebesar Rp.342.500.000,-.

Dari rerata indeks capaian kinerja 92,62% dan serapan anggaran 90,85% dapat dianggap bahwa Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha berkinerja baik, karena capaian kinerja sebanding dengan serapan anggaran dan terdapat efisiensi dana APBN yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha sebesar 9,15% atau Rp.25.675.724.735,-, efisiensi ini didapat dari perjalanan dan akomodasi kegiatan.

Dengan sumber daya manusia dan anggaran yang ada pada tahun 2018 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha berupaya mencapai tujuan organisasi dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam renstra. Dengan memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki baik yang ada pada satuan kerja pusat maupun daerah Ditjen Bimas Buddha selalu berusaha untuk mencapai yang terbaik dalam mewujudkan visi dan misinya.





## PENUTUP

Laporan Kinerja Ditjen Bimas Buddha disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Agama Nomor 702 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Pada Kementerian Agama.

Pelaksanaan program dan anggaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha tahun 2018 dapat dilaksanakan dengan cukup baik meskipun masih belum optimal. Hal ini terlihat dari Rerata tingkat capaian kinerja pada tahun 2018 sebesar 92,62%. Rerata capaian kinerja tahun 2018 tidak mencapai target 100% tetapi telah masuk dalam kategori baik. Indikator kinerja dengan realisasi capaian kinerja dengan kategori sangat baik dengan capaian lebih 100% sebanyak 1 (satu) indikator kinerja yaitu indeks layanan keagamaan Buddha.

Pada saran strategis 1 meningkatnya kualitas kehidupan umat Buddha dengan indikator kinerja indeks keshalihan sosial umat beragama Buddha target 70% dengan realisasi 58,43%. Dengan realisasi 58,43% tersebut capaian kinerja dari indeks keshalihan sosial umat beragama Buddha sebesar 83,47% dengan kategori baik. Ketidak tercapaian target IKU karena kurangnya koordinasi dalam pelaksanaan survey. Dimana Ditjen Bimas Buddha tidak dilibatkan dalam survey tersebut sehingga tidak dapat mengetahui secara detail apa penyebab ketidak tercapaian tersebut.

Pada sasaran strategis 2 meningkatnya harmonisasi sosial dan kerukunan intern umat beragama Buddha dengan indikator indeks kerukunan umat beragama Buddha target 75,90% dengan realisasi 70,90%. Dengan realisasi 70,90% tersebut capaian kinerja dari indikator indeks kerukunan





umat beragama Buddha Ditjen Bimas Buddha sebesar 93,41% dalam kategori baik.

Pada sasaran strategis 3 meningkatnya kualitas pelayanan keagamaan dengan dua indikator kinerja utama yaitu; 1. Persentase Lembaga keagamaan Buddha yang berbadan hukum target 75% dengan realisasi 70,72%. Dengan realisasi 70,72% tersebut capaian kinerja pada indikator persentase Lembaga keagamaan Buddha yang berbadan hukum sebesar 94,29% dalam kategori baik. Pada indikator indeks layanan keagamaan Buddha target 75% dengan realisasi 75,325%. Dengan realisasi 75,325% tersebut capaian kinerja pada indikator indeks layanan keagamaan Buddha sebesar 100,43% dalam kategori sangat baik.

Pada sasaran strategis 4 meningkatkan akses layanan Pendidikan dengan angka partisipasi kasar (APK) perguruan tinggi Buddha target 0,006 dengan realisasi 0,0055. Dengan realisasi 0,0055 tersebut capaian kinerja pada indikator angka partisipasi kasar sebesar 91,66% dalam kategori baik.

Dari capaian target kinerja dan realisasi anggaran tersebut dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha masuk dalam kategori baik. Dari semua sasaran strategis yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja secara umum berhasil dicapai dengan rata – rata baik. Dengan rerata capaian kinerja 92,62% dapat dikatakan bahwa kinerja organisasi Ditjen Bimas Buddha tercapai dengan baik.





## LAMPIRAN

*Orang yang memutuskan segala sesuatu dengan tergesa - gesa*

*Tidak dapat dikatakan sebagai orang adil*

*Orang bijaksana hendaknya memeriksa dengan teliti*

*Mana yang benar dan mana yang salah*



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Caliadi  
Jabatan : Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Lukman Hakim Saifuddin  
Jabatan : Menteri Agama

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 23 Januari 2018

Pihak Kedua,

Lukman Hakim Saifuddin

Pihak Pertama,

Caliadi

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018  
DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA**

No	Substansi	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas kehidupan umat Buddha	Indeks keshalihan sosial umat beragama	70%
2	Meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan Intern umat beragama Buddha	Indeks kerukunan umat beragama Buddha	75,90%
3	Meningkatnya kualitas pelayanan keagamaan Buddha	Prosentase lembaga keagamaan Buddha yang berbadan hukum	75%
		Indeks layanan keagamaan Buddha	75%
4	Meningkatnya akses layanan pendidikan	APK Pendidikan Tinggi Agama Buddha	0,006%

**Program Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha**

**Kegiatan**

**Anggaran**

1	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Buddha	Rp	38.471.077.000
2	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Buddha	Rp	25.635.217.000
3	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama dan Keagamaan Buddha	Rp	65.467.421.000
4	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Buddha	Rp	132.304.971.000
5	Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Agama Buddha	Rp	18.543.449.000
	<b>Jumlah Seluruh</b>	<b>Rp</b>	<b>280.422.135.000</b>

Menteri Agama



Lukman Hakim Saifuddin

Jakarta, 23 Januari 2018  
Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha



Calladi



## REKAP 2: PROGRAM K/L

### RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L) TAHUN ANGGARAN 2018

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN AGAMA
2. SASARAN STRATEGIS K/L YANG DIDUKUNG
  - 01 - Meningkatkan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama, Kerukunan Umat Beragama, Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, serta Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Berwibawa
3. PROGRAM
  - Program Bimbingan Masyarakat Buddha
4. UNIT ORGANISASI (ESELON 1)
  - Ditjen Bimbingan Masyarakat Buddha
5. PRIORITAS NASIONAL

KODE	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	ALOKASI 2018 (RIBU)
Total		0,00

#### 6. SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)

KODE	SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	TARGET 2018	ALOKASI 2018 (RIBU)
01	Mewujudkan pelayanan keagamaan dan pendidikan Buddha yang berkualitas		266.965.534,99
01.01	Jumlah lembaga agama dan keagamaan Buddha yang mendapatkan bantuan operasional	200	
01.02	Jumlah penyuluh agama Buddha Non PNS yang memperoleh tunjangan	1674	
01.03	Jumlah rumah ibadah yang mendapatkan bantuan rehab/ renov/ pembangunan	200	
01.04	Jumlah orang yang mendapatkan pembinaan keluarga Hitasukkhaya	1500	
01.05	Jumlah kegiatan dialog kerukunan intern umat beragama yang terselenggara	24	
01.06	Jumlah peserta didik yang mendapatkan pembinaan karakter	8000	
01.07	Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan agama dan keagamaan Buddha yang mendapatkan insentif	1550	
01.08	Jumlah pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan agama dan keagamaan Buddha yang humanis	35	
01.09	Jumlah guru agama Buddha Non PNS yang menerima tunjangan profesi	211	
01.10	Jumlah lembaga pendidikan agama dan keagamaan Buddha yang memperoleh bantuan rehab/ renov/ pembangunan	75	
01.11	Jumlah buku pendidikan agama Buddha yang tersedia	20000	

KODE	SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	TARGET 2018	ALOKASI 2018 (RIBU)
01.12	Jumlah lembaga pendidikan agama dan keagamaan Buddha yang memperoleh bantuan operasional	164	
01.13	Jumlah mahasiswa penerima bantuan Bidikmisi	350	
01.14	Jumlah Mahasiswa penerima beasiswa prestasi akademik	75	
01.15	Jumlah dosen Non PNS penerima tunjangan profesi	50	
01.16	Jumlah program studi pendidikan tinggi agama Buddha yang terakreditasi	5	
01.17	Jumlah penelitian dosen yang bermutu	125	
01.18	Jumlah penelitian mahasiswa yang bermutu	150	
01.19	Jumlah dosen yang ditingkatkan kualifikasinya	10	
01.20	Jumlah pengabdian terhadap masyarakat	12	
01.21	Jumlah mahasiswa agama Buddha yang mendapatkan pembinaan karakter	500	
01.22	Jumlah mahasiswa penerima bantuan operasional perguruan tinggi negeri (BOPTN)	310	
01.23	Jumlah institusi perguruan tinggi agama Buddha yang terakreditasi	2	
	Total		266.965.534,99

## 7. OUTPUT PROGRAM DAN INDIKATOR OUTPUT PROGRAM

KODE	OUTPUT PROGRAM / INDIKATOR OUTPUT PROGRAM	ALOKASI 2018 (RIBU)
01	Layanan keagamaan Buddha	64.106.292,99
01.01	Jumlah penyuluh agama Buddha non PNS yang menerima tunjangan	
01.02	Jumlah lembaga sosial keagamaan yang difasilitasi dalam penguatan dan pemberdayaan	
01.03	Jumlah keluarga Buddha yang memperoleh bimbingan keluarga Hitthasukhaya	
01.04	Jumlah rumah ibadah yang difasilitasi dalam penguatan dan pemberdayaan	
02	Layanan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Buddha	215.315.842,00
02.01	Jumlah peserta didik yang mendapatkan pendidikan karakter	
02.02	Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang mendapatkan insentif	
02.03	Jumlah pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan yang humanis	
02.04	Jumlah guru agama Buddha non PNS penerima tunjangan profesi	
02.05	Jumlah lembaga pendidikan agama dan keagamaan Buddha yang memperoleh bantuan rehab/renow/pembangunan	
02.06	Jumlah TOT USBN mata pelajaran agama dan budi pekerti	
02.07	Jumlah lembaga pendidikan keagamaan Buddha yang memperoleh bantuan sarana prasarana	
02.08	Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan agama dan keagamaan khusus (31) yang mendapat tunjangan	

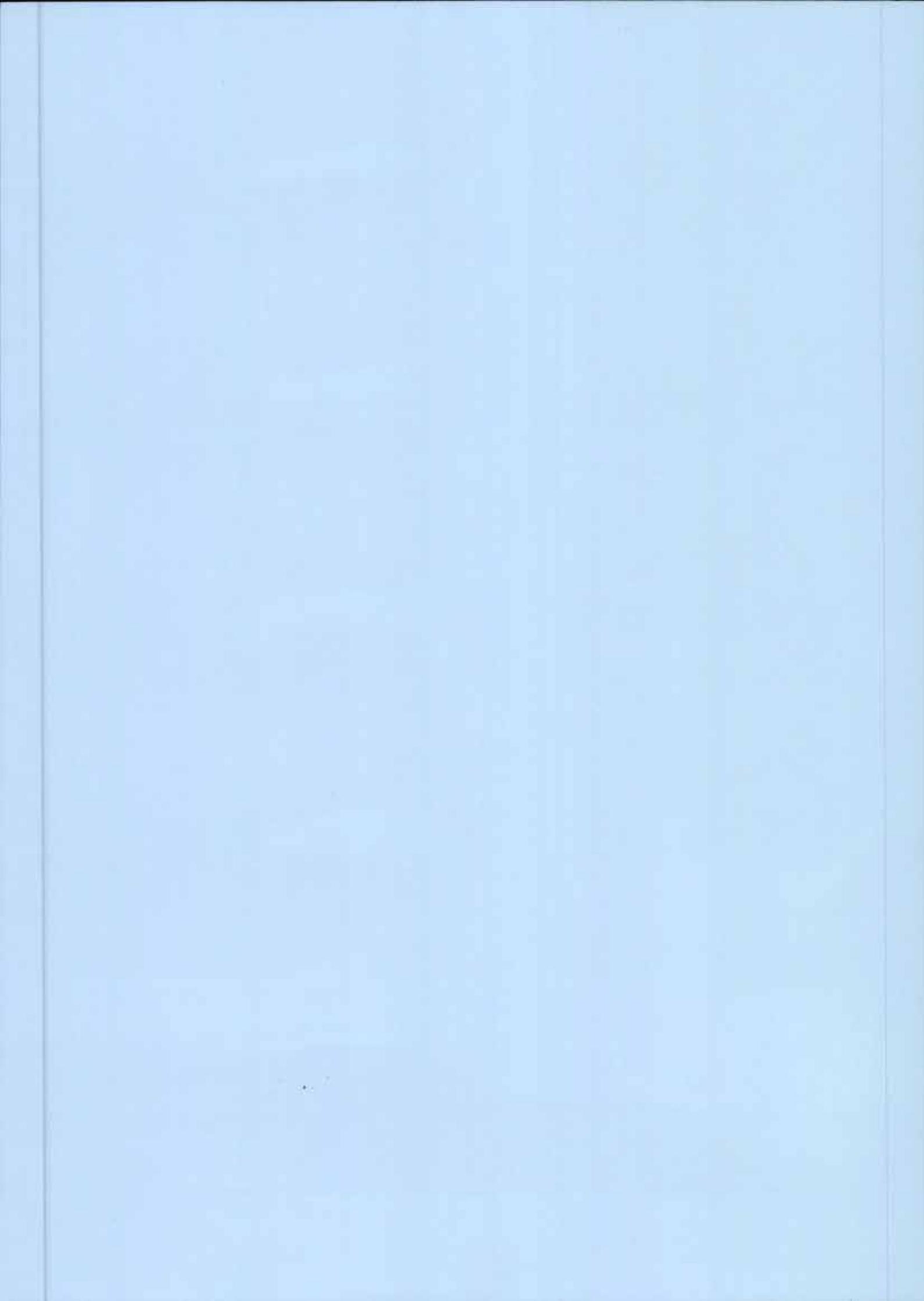
KODE	OUTPUT PROGRAM / INDIKATOR OUTPUT PROGRAM	ALOKASI 2018 (RIBU)
02.09	Jumlah buku pendidikan agama dan keagamaan Buddha yang tersedia	
02.10	Jumlah lembaga pendidikan keagamaan Buddha yang memperoleh bantuan operasional	
02.11	Jumlah mahasiswa penerima bidik misi	
02.12	Jumlah mahasiswa penerima beasiswa PPA	
02.13	Jumlah dosen non PNS penerima tunjangan profesi	
02.14	Jumlah dosen yang ditingkatkan kompetensinya	
02.15	Jumlah prodi perguruan tinggi yang terakreditasi	
02.16	Jumlah penelitian dosen yang bermutu	
02.17	Jumlah penelitian mahasiswa yang bermutu	
02.18	Jumlah dosen yang ditingkatkan kualifikasinya	
02.19	Jumlah pengabdian masyarakat	
02.20	Jumlah mahasiswa agama Buddha yang mendapatkan pembinaan karakter	
02.21	Jumlah mahasiswa penerima bantuan operasional perguruan tinggi negeri	
02.22	Jumlah institusi perguruan tinggi agama Buddha yang terakreditasi	
	Total	279.422.134,99

## 8. KEGIATAN DAN PENDANAAN

KODE	KEGIATAN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2018										PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)			
		RUPIAH	PINJAMAN		HIBAH			PNBP	PDN	SBSN	BLU	TOTAL	2019	2020	2021
			RMP	PLN	RMP	HLN	HDN								
2145	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Buddha	37.982.945,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.982.945,99	42.714.810,00	47.268.210,00	52.107.610,00
2146	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Buddha	26.123.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.123.347,00	34.400.000,00	39.100.000,00	43.800.000,00
4012	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Buddha	64.105.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.105.450,00	51.655.000,00	70.901.000,00	57.547.000,00
5105	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Buddha	128.078.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.078.227,00	129.104.000,00	135.105.000,00	145.106.000,00

5106	Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi <del>KEGIATAN</del> Tinggi Agama Budha	22.849.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.596.012,00	22.231.012,00	24.866.012,00
KODE	RUPIAH		RAMP	PLN	RMP	HILN	HON	PNBP	PON	SBSN	BLU	TOTAL	2019	2020	2021
		279.139.390,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.744,00	0,00	0,00	0,00	279.422.134,99	281.469.822,00	314.605.222,00	323.426.622,00
	Total														

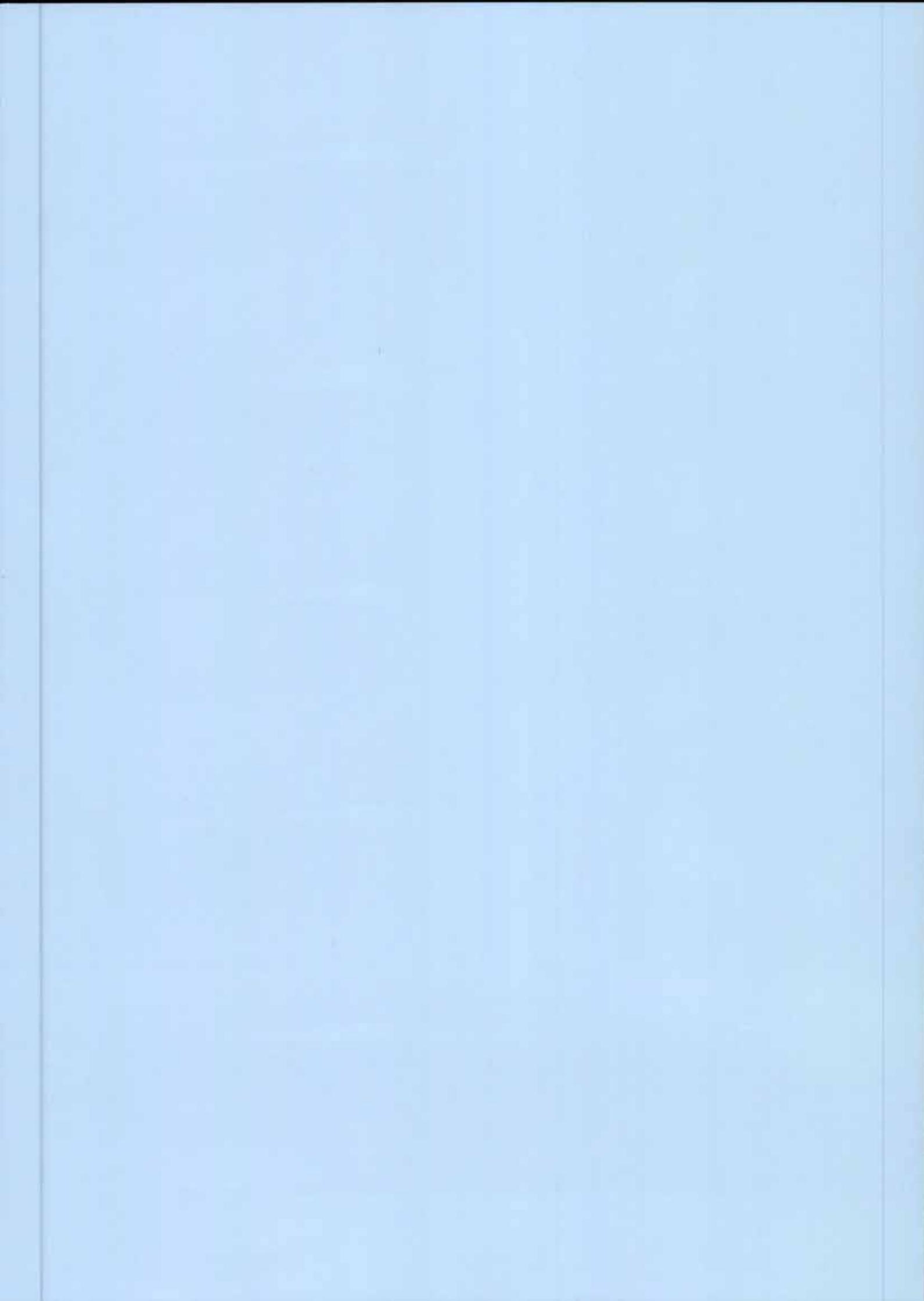
Jakarta, 21 Februari 2019



LAPORAN REALISASI BELANJA PER JENIS KEGIATAN  
BULAN: s/d FEBRUARI 2018

KEMENTERIAN/LEMBAGA : [MANUAL] KEMENTERIAN AGAMA  
ESELON I : DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA

No	Kode/jenis Kegiatan	Keterangan	Jenis Belanja											Total
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	Bansos	Lain-lain	Transfer			
1	2145   PENGELOLAAN DAN PEMBIANAN URUSAN AGAMA BUDHA	PAGU REALISASI PERSENTASE SISA	9,894,000,000 9,819,500,000 (99.25%) 74,500,000	29,121,933,000 27,573,831,003 (94.68%) 1,548,101,997	5,000,000 5,000,000 (100.00%) 0	0 0 0.00% 0	39,020,933,000 37,398,331,003 (95.84%) 1,622,601,997							
2	2146   DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA BIMAS BUDHA	PAGU REALISASI PERSENTASE SISA	7,342,996,000 7,295,353,190 (99.35%) 47,642,810	15,277,837,000 14,046,656,097 (91.94%) 1,231,180,903	2,573,338,000 2,183,358,112 (84.85%) 389,979,888	0 0 0.00% 0	25,194,171,000 23,525,367,399 (93.38%) 1,668,803,601							
3	4012   PENGELOLAAN DAN PEMBIANAN PENDIDIKAN AGAMA BUDHA	PAGU REALISASI PERSENTASE SISA	10,517,733,000 9,808,555,000 (93.26%) 709,178,000	53,363,677,000 50,210,823,177 (94.09%) 3,152,853,823	0 0 0.00% 0	0 0 0.00% 0	0 0 0.00% 0	0 0 0.00% 0	0 0 0.00% 0	0 0 0.00% 0	0 0 0.00% 0	0 0 0.00% 0	0 0 0.00% 0	63,881,410,000 60,019,378,177 (93.95%) 3,862,031,823
4	5105   PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PENDIDIKAN BIMAS BUDHA	PAGU REALISASI PERSENTASE SISA	104,047,892,000 90,438,032,548 (86.92%) 13,609,859,452	30,160,077,000 27,547,344,221 (91.34%) 2,612,732,779	163,400,000 162,400,000 (99.39%) 1,000,000	0 0 0.00% 0	134,371,369,000 118,147,776,769 (87.93%) 16,223,592,231							
5	5106   PENINGKATAN AKSES, MUTU, KESAJAHTERAAN DAN SUBSIDI PENDIDIKAN TINGGI AGAMA BUDHA	PAGU REALISASI PERSENTASE SISA	1,679,819,000 1,420,864,200 (84.58%) 258,954,800	14,659,633,000 12,829,711,357 (87.52%) 1,829,921,643	0 0 0.00% 0	0 0 0.00% 0	0 0 0.00% 0	0 0 0.00% 0	0 0 0.00% 0	0 0 0.00% 0	0 0 0.00% 0	0 0 0.00% 0	0 0 0.00% 0	18,254,252,000 16,058,675,557 (87.97%) 2,195,576,443
GRAND TOTAL			133,482,440,000	142,583,157,000	2,741,738,000	0	0	0	0	0	0	0	0	280,722,135,000
REALISASI			118,782,304,938	132,208,365,855	2,150,758,112	0	0	0	0	0	0	0	0	255,149,528,905
PERSENTASE			(88.99%)	(92.72%)	(85.74%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	(90.89%)
SISA			14,700,135,062	10,374,791,145	390,979,888	0	0	0	0	0	0	0	0	25,572,606,095





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DITJEN PERBENDAHARAAN

LAPORAN REALISASI BELANJA PER WILAYAH  
BULAN: s/d FEBRUARI 2018

KEMENTERIAN/LEMBAGA : [MANUAL] KEMENTERIAN AGAMA  
ESELON I : DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA

No	Wilayah	Kategori	Jenis Belanja										Total			
			Program	Berapa	Mudah	Bukan Berapa	Salvada	Hilang	Rampas	Laba-laba	Transfer					
1	DKI JAKARTA 01	PAGU	17.137.451,000	43.652.251,000	1.284.150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62.073.852,000
		REALISASI	15.392.753,307	38.664.946,134	924.666,813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54.982.366,254
		PERSENTASE SISA	(89,82%) 1.744.697,693	(88,57%) 4.987.304,866	(72,01%) 359.483,187	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	(88,58%) 7.091.485,746
2	JAWA BARAT 02	PAGU	5.071.589,000	2.798.704,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.870.293,000
		REALISASI	4.659.404,086	2.629.732,816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.289.136,902
		PERSENTASE SISA	(91,87%) 412.184,914	(93,96%) 1.689.971,184	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	(92,62%) 581.156,098
3	JAWA TENGAH 03	PAGU	18.521.265,000	10.311.748,000	131.400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.476.013,000
		REALISASI	16.709.362,926	9.429.620,672	130.910,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.731.493,598
		PERSENTASE SISA	(90,22%) 1.811.902,074	(91,45%) 882.127,328	(99,63%) 490,000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	(90,99%) 2.744.519,402
4	DI YOGYAKARTA 04	PAGU	2.331.656,000	1.815.285,000	69.500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.216.441,000
		REALISASI	1.981.331,436	1.627.757,181	65.727,273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.674.815,890
		PERSENTASE SISA	(84,98%) 350.324,564	(89,67%) 187.527,819	(94,57%) 3.772,727	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	(87,15%) 541.625,110
5	JAWA TIMUR 05	PAGU	8.712.679,000	5.254.545,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.967.224,000
		REALISASI	7.462.757,569	5.102.727,336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.565.484,905
		PERSENTASE SISA	(85,65%) 1.249.921,431	(97,11%) 151.817,664	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	(89,96%) 1.401.739,095
6	ACEH 06	PAGU	367.832,000	1.590.623,000	30.000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.988.455,000
		REALISASI	241.513,366	1.430.641,298	29.522,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.702.076,864
		PERSENTASE SISA	(65,66%) 126.318,634	(89,94%) 159.981,702	(99,74%) 77,800	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	(85,60%) 286.378,136
7	SUMATERA UTARA 07	PAGU	7.423.500,000	3.693.436,000	73.050,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.189.986,000
		REALISASI	6.338.893,747	3.551.546,061	73.035,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.963.485,408
		PERSENTASE SISA	(85,39%) 1.084.606,253	(96,16%) 141.879,939	(99,98%) 14,400	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	(89,04%) 1.226.500,592
8	SUMATERA BARAT 08	PAGU	541.070,000	1.268.977,000	45.000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.855.047,000
		REALISASI	432.600,262	1.258.699,358	44.902,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.736.201,620
		PERSENTASE SISA	(79,95%) 108.469,738	(99,19%) 10.277,642	(99,78%) 98,000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	(93,59%) 118.845,380
9	RIAU 09	PAGU	5.105.895,000	5.861.498,000	41.000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.008.393,000
		REALISASI	4.565.499,557	5.409.145,156	35.190,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.009.834,813
		PERSENTASE SISA	(89,42%) 540.395,443	(92,28%) 452.352,844	(85,83%) 5,809,900	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	(90,93%) 998.558,187

10	JAMBI ID	PAGU REALISASI PERSENTASE SISA	3.910.572.000 3.147.338.978 (80,48%) 763.233.022	2.013.261.000 1.945.223.500 (96,62%) 68.037.500	100.000.000 99.390.000 (99,39%) 610.000	0 0 0,00%	6.023.833.000 5.191.952.478 (86,19%) 831.880.522													
11	SUMATERA SELATAN 11	PAGU REALISASI PERSENTASE SISA	2.938.108.000 2.738.968.806 (93,22%) 199.139.194	2.677.040.000 2.582.774.800 (96,48%) 94.265.200	40.000.000 36.850.000 (92,13%) 3.150.000	0 0 0,00%	5.655.148.000 5.358.593.606 (94,76%) 296.554.394													
12	LAMPUNG 12	PAGU REALISASI PERSENTASE SISA	7.029.484.000 6.320.868.904 (89,92%) 708.615.096	3.539.661.000 3.215.790.753 (90,85%) 323.870.247	0 0 0,00%	0 0 0,00%	0 0 0,00%	0 0 0,00%	0 0 0,00%	0 0 0,00%	0 0 0,00%	0 0 0,00%	0 0 0,00%	0 0 0,00%	0 0 0,00%	0 0 0,00%	0 0 0,00%	0 0 0,00%	0 0 0,00%	10.569.145.000 9.536.659.657 (90,23%) 1.032.485.343
13	KALIMANTAN BARAT 13	PAGU REALISASI PERSENTASE SISA	6.515.569.000 6.032.796.396 (92,59%) 482.772.604	4.106.242.000 3.849.560.490 (93,75%) 256.681.510	163.468.000 164.542.226 (99,42%) 955.774	0 0 0,00%	10.787.309.000 10.046.899.112 (93,14%) 740.409.888													
14	KALIMANTAN TENGAH 14	PAGU REALISASI PERSENTASE SISA	1.986.444.000 1.599.933.840 (80,54%) 386.510.160	2.019.246.000 1.923.828.204 (95,27%) 95.417.796	0 0 0,00%	0 0 0,00%	0 0 0,00%	0 0 0,00%	0 0 0,00%	0 0 0,00%	0 0 0,00%	0 0 0,00%	0 0 0,00%	0 0 0,00%	0 0 0,00%	0 0 0,00%	0 0 0,00%	0 0 0,00%	0 0 0,00%	4.005.690.000 4.081.454.619 (95,90%) 174.235.381
15	KALIMANTAN SELATAN 15	PAGU REALISASI PERSENTASE SISA	2.018.927.000 1.908.053.574 (94,51%) 110.873.426	2.236.946.000 2.173.401.045 (97,16%) 63.544.955	0 0 0,00%	0 0 0,00%	0 0 0,00%	0 0 0,00%	0 0 0,00%	0 0 0,00%	0 0 0,00%	0 0 0,00%	0 0 0,00%	0 0 0,00%	0 0 0,00%	0 0 0,00%	0 0 0,00%	0 0 0,00%	0 0 0,00%	4.255.873.000 4.081.454.619 (95,90%) 174.418.381
16	KALIMANTAN TIMUR 16	PAGU REALISASI PERSENTASE SISA	3.210.209.000 2.539.663.348 (79,11%) 670.545.652	3.271.776.000 3.203.066.935 (97,90%) 68.709.065	20.000.000 20.000.000 (100,00%) 0	0 0 0,00%	6.501.985.000 5.762.730.283 (88,63%) 739.254.717													
17	SULAWESI UTARA 17	PAGU REALISASI PERSENTASE SISA	908.756.000 802.691.227 (88,33%) 106.064.773	1.422.724.000 1.406.778.224 (98,88%) 15.945.776	41.300.000 41.300.000 (100,00%) 0	0 0 0,00%	2.372.780.000 2.250.769.451 (94,86%) 122.010.549													
18	SULAWESI TENGAH 18	PAGU REALISASI PERSENTASE SISA	1.390.425.000 1.200.299.721 (86,33%) 190.125.279	1.796.893.000 1.796.892.300 (100,00%) 700	0 0 0,00%	0 0 0,00%	0 0 0,00%	0 0 0,00%	0 0 0,00%	0 0 0,00%	0 0 0,00%	0 0 0,00%	0 0 0,00%	0 0 0,00%	0 0 0,00%	0 0 0,00%	0 0 0,00%	0 0 0,00%	0 0 0,00%	3.187.318.000 2.997.192.021 (94,03%) 190.125.979
19	SULAWESI SELATAN 19	PAGU REALISASI PERSENTASE SISA	1.200.111.000 993.715.580 (82,80%) 206.395.420	1.585.343.000 1.516.508.280 (95,66%) 68.834.720	0 0 0,00%	0 0 0,00%	0 0 0,00%	0 0 0,00%	0 0 0,00%	0 0 0,00%	0 0 0,00%	0 0 0,00%	0 0 0,00%	0 0 0,00%	0 0 0,00%	0 0 0,00%	0 0 0,00%	0 0 0,00%	0 0 0,00%	2.785.454.000 2.510.223.860 (90,12%) 275.230.140
20	SULAWESI TENGGARA 20	PAGU REALISASI PERSENTASE SISA	848.243.000 540.059.343 (63,67%) 308.183.657	1.670.073.000 1.659.577.784 (99,37%) 10.495.216	0 0 0,00%	0 0 0,00%	0 0 0,00%	0 0 0,00%	0 0 0,00%	0 0 0,00%	0 0 0,00%	0 0 0,00%	0 0 0,00%	0 0 0,00%	0 0 0,00%	0 0 0,00%	0 0 0,00%	0 0 0,00%	0 0 0,00%	2.518.316.000 2.199.637.127 (87,35%) 318.678.873
21	MALUKU 21	PAGU REALISASI PERSENTASE SISA	347.970.000 338.770.640 (97,36%) 9.199.360	1.812.563.000 1.793.688.389 (99,28%) 18.874.611	27.700.000 27.500.000 (99,28%) 200.000	0 0 0,00%	10.843.676.000 10.203.918.753 (94,10%) 639.757.247													
22	BALI 22	PAGU REALISASI PERSENTASE SISA	5.362.496.000 4.885.408.026 (91,10%) 477.087.974	5.438.430.000 5.278.343.127 (97,06%) 160.086.873	42.750.000 40.167.600 (93,96%) 2.582.400	0 0 0,00%	10.843.676.000 10.203.918.753 (94,10%) 639.757.247													

23	NUSA TENGGARA BARAT 23	PAGU REALISASI PERSENTASE SISA	3.263.267.000 2.899.927.028 (88,87%) 363.339.972	3.749.225.000 3.558.695.753 (94,92%) 190.529.247	6.000.000 6.000.000 (100,00%) 0	0 0 0,00% 0	7.018.492.000 6.494.622.781 (92,11%) 553.869.219									
24	NUSA TENGGARA TIMUR 24	PAGU REALISASI PERSENTASE SISA	648.413.000 502.764.887 (77,54%) 145.648.113	2.156.998.000 2.023.696.466 (93,82%) 133.299.534	35.000.000 35.000.000 (100,00%) 0	0 0 0,00% 0	2.840.411.000 2.561.463.353 (90,18%) 278.947.647									
25	PAPUA 25	PAGU REALISASI PERSENTASE SISA	1.635.539.000 1.497.213.767 (91,54%) 138.325.233	3.016.478.000 2.901.367.563 (96,18%) 115.110.437	150.000.000 149.700.000 (99,80%) 300.000	0 0 0,00% 0	4.802.017.000 4.548.281.330 (94,72%) 253.735.670									
26	BENGKULU 26	PAGU REALISASI PERSENTASE SISA	1.196.512.000 1.072.184.036 (89,61%) 124.327.964	2.255.349.000 2.169.393.414 (96,19%) 85.955.586	0 0 0,00% 0	0 0 0,00% 0	0 0 0,00% 0	0 0 0,00% 0	0 0 0,00% 0	0 0 0,00% 0	0 0 0,00% 0	0 0 0,00% 0	0 0 0,00% 0	0 0 0,00% 0	0 0 0,00% 0	3.451.861.000 3.241.577.450 (93,91%) 210.283.550
27	MALUKU UTARA 28	PAGU REALISASI PERSENTASE SISA	18.000.000 18.000.000 (100,00%) 0	211.700.000 112.458.000 (53,12%) 99.242.000	0 0 0,00% 0	0 0 0,00% 0	0 0 0,00% 0	0 0 0,00% 0	0 0 0,00% 0	0 0 0,00% 0	0 0 0,00% 0	0 0 0,00% 0	0 0 0,00% 0	0 0 0,00% 0	0 0 0,00% 0	229.700.000 130.458.000 (56,79%) 99.242.000
28	BANTEN 29	PAGU REALISASI PERSENTASE SISA	12.550.475.000 11.822.835.717 (94,20%) 727.639.283	6.289.375.000 7.522.082.885 (90,74%) 1.236.707.885	82.500.000 77.550.000 (94,00%) 4.950.000	0 0 0,00% 0	21.325.550.000 19.768.968.602 (92,70%) 1.556.581.398									
29	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 30	PAGU REALISASI PERSENTASE SISA	3.783.908.000 3.413.443.010 (90,21%) 370.464.990	2.987.719.000 2.948.090.305 (98,67%) 39.628.695	31.530.000 31.500.000 (99,90%) 30.000	0 0 0,00% 0	6.803.157.000 6.393.033.315 (93,97%) 410.123.685									
30	GORONTALO 31	PAGU REALISASI PERSENTASE SISA	250.452.000 133.917.124 (53,47%) 116.534.876	584.488.000 565.254.950 (96,71%) 19.233.050	0 0 0,00% 0	0 0 0,00% 0	0 0 0,00% 0	0 0 0,00% 0	0 0 0,00% 0	0 0 0,00% 0	0 0 0,00% 0	0 0 0,00% 0	0 0 0,00% 0	0 0 0,00% 0	0 0 0,00% 0	834.940.000 699.172.074 (83,74%) 135.767.926
31	KEPULAUAN RIAU 32	PAGU REALISASI PERSENTASE SISA	5.346.060.000 5.020.087.218 (93,90%) 325.972.782	4.149.553.000 3.691.381.742 (89,23%) 458.171.258	221.500.000 216.222.300 (97,62%) 5.277.700	0 0 0,00% 0	9.717.113.000 9.127.691.260 (93,93%) 589.421.740									
32	PAPUA BARAT 33	PAGU REALISASI PERSENTASE SISA	964.388.000 822.561.231 (85,29%) 141.826.769	2.499.918.000 2.395.519.763 (95,82%) 104.398.237	25.000.000 22.030.000 (88,12%) 2.970.000	0 0 0,00% 0	3.489.306.000 3.240.110.994 (92,86%) 249.195.006									
33	SULAWESI BARAT 34	PAGU REALISASI PERSENTASE SISA	357.007.000 218.558.793 (61,22%) 138.448.207	1.499.408.000 1.427.884.072 (95,23%) 71.523.928	32.560.000 32.452.000 (99,67%) 108.000	0 0 0,00% 0	1.888.975.000 1.678.694.865 (88,88%) 210.280.135									
34	KALIMANTAN UTARA 35	PAGU REALISASI PERSENTASE SISA	588.168.000 528.127.488 (89,79%) 60.040.512	1.345.681.000 1.242.299.099 (92,32%) 103.381.901	46.300.000 46.200.000 (99,78%) 100.000	0 0 0,00% 0	1.980.149.000 1.816.626.587 (91,74%) 163.522.413									
35	ZZ	PAGU REALISASI PERSENTASE SISA	0 0 0,00% 0	0 0 0,00% 0	0 0 0,00% 0	0 0 0,00% 0	0 0 0,00% 0	0 0 0,00% 0	0 0 0,00% 0	0 0 0,00% 0	0 0 0,00% 0	0 0 0,00% 0	0 0 0,00% 0	0 0 0,00% 0	0 0 0,00% 0	0 0 0,00% 0

GRAND TOTAL	PAGU	133.483.462.000	142.583.337.000	2.393.734.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285.722.335.000
	BUNDAI	118.763.004.018	132.208.365.815	2.330.754.312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253.448.518.805
	PROSEKSI	84.594	98.776	815.786	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	90.893
	USA	14.000.000.000	9.602.200.000	292.184.888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.172.688.095

